

**ANALISIS PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DI KABUPATEN PINRANG**

**(Studi Kasus: Pengentasan Anak Putus Sekolah  
Di Kecamatan Lembang)**

**Skripsi**

**Untuk memenuhi sebagian Persyaratan  
untuk mencapai derajat Sarjana S-1**

**Program Studi Ilmu Pemerintahan**



**Oleh**

**FITRIANI SARI HANDAYANI RAZAK**

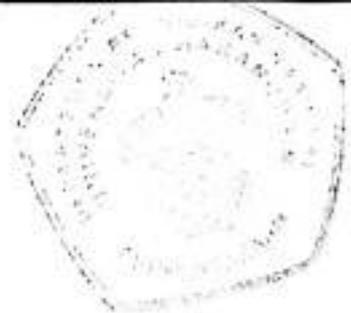
**E 121 08 007**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2012**



**LEMBARAN PENGESAHAN**

**Skripsi**

**ANALISIS PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DI KABUPATEN PINRANG  
(STUDI KASUS: PENGENTASAN ANAK PUTUS SEKOLAH  
DI KECAMATAN LEMBANG)**

yang dipersiapkan dan disusun oleh

**Fitriani Sari Handayani Razak**

**E121 08 007**

telah dipertahankan di depan panitia ujian skripsi  
pada tanggal 14 Februari 2012  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui :

Pembimbing I

**Dr. H. A. Gau Kadir, MA**

NIP. 19501017 198003 1 002

Pembimbing II

**Dr. Muh. Tamar, M.PSi**

NIP. 19641231 199002 1 004

Mengetahui

Menyetujui :

Ketua Jurusan Ilmu Politik dan

Ilmu Pemerintahan

**Dr. Muhammad, S.IP, M.Si**

NIP. 19710917 199703 1 001

Ketua Program Studi

Ilmu Pemerintahan

**Dr. H. A. Gau Kadir, MA**

NIP. 19501017 198003 1 002

**LEMBARAN PENERIMAAN**

**Skripsi**

**ANALISIS PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN PINRANG  
(STUDI KASUS: PENGENTASAN ANAK PUTUS SEKOLAH  
DI KECAMATAN LEMBANG)**

yang dipersiapkan dan disusun oleh  
Fitriani Sari Handayani Razak

E121 08 007

telah diperbaiki

dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh panitia ujian skripsi

pada Program Studi Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

**Makassar, 14 Februari 2012**

Menyetujui:

Panitia Ujian

Ketua : Dr. H. A. Gau Kadir, MA

Sekretaris : A. Lukman Irwan, S.IP, M.Si

Anggota : Dr. Muh. Tamar, M.Psi

Anggota : Dra. Hj. Nurlinah, M. M.Si

Anggota : Drs. Abd. Salam Muchtar

Pembimbing I : Dr. H. Gau Kadir, MA

Pembimbing II : Dr. Muh. Tamar, M.PSi



(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*"Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh"*

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya semoga kita senantiasa berada dalam lindungan-Nya. Teriring salam dan salawat pada junjungan Rasulullah SAW dan Keluarga yang dicintainya beserta sahabat-sahabatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.

Skripsi ini berjudul **"Analisis Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Pinrang (Studi Kasus: Pengentasan Anak Putus Sekolah di Kecamatan Lembang)"** Dalam format sederhana, penulis menyusun skripsi ini sebagai karya ilmiah yang merupakan persyaratan memperoleh gelar kesarjanaan pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Jurusan Ilmu Politik Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan suatu karya ilmiah tidaklah mudah, oleh karena itu tidak tertutup kemungkinan dalam penyusunan skripsi ini terdapat kekurangan, sehingga penulis sangat

mengharapkan masukan dan saran, kritikan yang bersifat membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Proses penyusunan skripsi ini, penulis tidak terlepas dari berbagai rintangan, mulai dari pengumpulan literatur, pengumpulan data sampai pada pengolahan data maupun dalam tahap penulisan. Namun dengan kesabaran dan ketekunan yang dilandasi dengan rasa tanggung jawab selaku mahasiswa dan juga bantuan dari berbagai pihak, baik material maupun moril.

Olehnya itu dalam kesempatan ini izinkanlah penulis mengucapkan *Jazakumullahu Khairan katsira* kepada yang terhormat;

1. Bapak Prof. Dr. dr. Idrus Paturusi, Sp. BO. FICS, selaku Rektor Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan studi Strata Satu (S1) di kampus terbesar di Indonesia Timur ini, Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Prof. Dr. H Hamka Naping, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta seluruh stafnya.
3. Bapak Dr. Muhammad, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Politik Pemerintahan FISIP UNHAS beserta seluruh stafnya.

4. Bapak Dr. H. A. Gau Kadir, MA selaku Pembimbing I dan Dr. Muh. Tamar, M.PSi selaku Pembimbing II yang selalu meluangkan waktunya dalam membimbing penulis hingga penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Bupati Pinrang H. A. Aslam Patonangi dan segenap staf Kantor Daerah Kabupaten Pinrang, terima kasih atas segala bantuan yang telah diberikan selama penulis melaksanakan penelitian.
6. Bapak Zulkarnain Gaffar. S,sos. M.Si selaku Camat Lembang dan Abd Patnan Sittara, S.E selaku Sekretaris Camat Kecamatan Lembang dan seluruh pegawai dan staf di Kantor Camat Lembang.
7. Seluruh staf pengajar, baik dosen maupun asistennya dan staf pegawai di lingkup FISIP UNHAS.
8. Keluarga Besarku La Darise (Keluarga besar dari ibunda) dan H. Badarong (keluarga besar dari ayah) yang senantiasa memberikan spirit dan segala bantuannya dalam menyelesaikan studi di Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas.
9. Saudara-saudaraku 'Glasnost 08' yang senantiasa menapaki kehidupan di kampus bersama: Isgunandar, Abd. Gafur, Muh. Ansari, anjar Zakaruddin, Firman Udding, edi Wahyu, Muh,

Nurhidayat, Subandi, Reksa Burhan, Melisa Fitrah, A. Muzkirah, Chaca, Satriah, Anitha Nurak (Kepala Suku), Arianitalia, Indah Iswary Johor, Desy andriani Pratiwi, Avrina Dwijayanti, Silvanty A Sangadji, Hijrah Khaerana, Dedy Irawan, Farid Hermansyah, Mitha, Zahra AR, Febrina Ponna, Yuniar Eka Rahmi, Kasmirah, Nurlaila, Ayu Khaira, Rini, Istiana Aminuddin, A. Ardiana Islamia P, Haswan, Alfriyadi, Akmaluddin, A. Ashabul, Uphy, Miskat, A. Muh. Luhtfi, La Ode Muh. Amin, Zaenal Ahkmad, Kukuh Erlangga, Ahwandy, Asrul Prayuda, Reskiyanto Taulabi Kia, A. Muh. Akram. Agus. Azhar Prawino, Asrul Nurdin, Ummhank, Hidayatul Mursyidin, Fahri Rezky Rahman, Aan, Herwin Gunawan, Reza Pratama, Erlangga dan Aswardi terimakasih atas persaudaraan dan persahabatan kalian semoga tetap terjalin forever.

10. Segenap Keluarga Besar HIMAPEM terima kasih yang tiada terhingga karena telah diberikan wadah belajar dan mencari pengalaman di lembaga kita. Semoga kejayaan lembaga kita tetap di pertahankan.
11. Seluruh teman-teman KKN Reguler Gelombang 80 Unhas 2011 Desa Seppang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, terkhusus buat Nur Ainun (si\_Aisyah), Artha Kantata Adyaksa (Si Kordes\_Galau Tingkat Tinggi), Fauziah Risanty Pratiwi

(Ussy\_sang artis antagonis), Hairul Anwar (Chilo\_x sang antropolog), Abdul Malikussaleh (Amsal\_sang Robot), dan Edy Rahmat Abu Bakar (Mas Edy Baskoro\_pria rajin).

12. Saudariku di Pondok Rahmat: K' Wisdawati Jamal SH, Besse Akrariyana Makkarumpa, Suamaya, Rika Alfianty Natsir, Risky Mustika S, Ayu/Suci, Surahma, Imha, Anty dan Dime.
13. Sahabat setiaku Eka Purnama Latif (Ochonk) dan Amrullah (Beo').
14. Teman-teman Ikatan Alumni Smansal (SMA N 1 Lembang).
15. **The One and Only in My Heart...**
16. Kepada seluruh pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang patut mendapatkan ucapan terima kasih.

Akhirnya teristimewa penulis sampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ayahanda **Abdurrazak S.Pd** dan Ibunda **Hj. Nurjannah S.Pd** yang telah mencurahkan seluruh cinta, kasih sayang, cucuran keringat, air mata, untaian doa serta pengorbanan yang tiada henti, yang hingga kapanpun penulis takkan bisa membalasnya. Maafkan jika ananda sering menyusahkan, merepotkan, serta melukai perasaan ayahanda dan Ibunda. Keselamatan Dunia Akhirat semoga selalu untukmu. Semoga Allah selalu menyapamu dengan Cinta-Nya. Kakakku, **AR. Firdaus** serta adik-adikku **AR Fatahillah** dan **Faridha Sari Handayani Razak** yang telah mencurahkan

kasih sayang, dorongan moril serta senantiasa menemani penulis dalam duka, canda dan tawa.

Akhirnya, penulis berharap bahwa apa yang disajikan dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Semoga kesemuanya ini dapat bernilai ibadah di sisi-Nya, Amin!

Sekian dan terimakasih.

*Billahi Taufiq Wal Hidayah*

*Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakathuh*

Makassar, Februari 2012

**Penulis**

## ABSTRAK

**FITRIANI SARI HANDAYANI RAZAK. NIM E 121 08 007. Analisis Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Pinrang (Studi Kasus: Pengentasan Anak Putus Sekolah di Kecamatan Lembang ), di bawah bimbingan Dr. H. A. Gau Kadir, MA dan Dr. Muh. Tamar M.Psi.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa peranan pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat khususnya dalam pengentasan anak putus sekolah di Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang.

Penelitian ini bersifat deskriptif yang memberikan gambaran secara faktual mengenai analisa peranan pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat khususnya mengenai pengentasan anak putus sekolah di Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Dari hasil penelitian menunjukkan: (1) Kondisi obyektif anak putus sekolah di Kecamatan Lembang mencapai angka 979 anak, terdiri dari tingkat SD berjumlah 166 anak, SMP 372, dan SMA 441 anak. (2) Berdasarkan 5 kasus yang ditemukan penulis di lapangan, faktor yang menjadi penyebab anak tidak atau putus sekolah adalah: (a) Lemahnya ekonomi keluarga, (b) Latar belakang pendidikan orang tua, (c) Kurangnya minat untuk bersekolah, (d) Kondisi lingkungan tempat tinggal, (e) Teman Sepergaulan, (f) Pandangan masyarakat mengenai pendidikan. (3) Peranan pemerintah daerah Kabupaten Pinrang dalam mengentaskan anak putus sekolah yang terjadi di Kecamatan Lembang yakni: (a) Membuat suatu kebijakan untuk mengentaskan anak putus sekolah, (b) Sosialisasi kepada masyarakat, (c) Memberikan bantuan berupa dana, (d) Optimalisasi pemberian beasiswa pendidikan bagi masyarakat miskin, dan (e) Program bantuan paket. Sejauh ini program pemerintah yang kurang terealisasi dengan baik adalah sosialisasi kepada masyarakat, optimalisasi pemberian beasiswa pendidikan bagi masyarakat miskin dan program bantuan paket pendidikan. Hal ini terjadi kurangnya kerjasama dengan pemerintah daerah terkait yakni Kepala Desa/Lurah dengan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga mengenai data masyarakat miskin serta tidak meratanya informasi kepada masyarakat.

## ABSTRACT

**Fitriani Sari Handayani Razak. NIM E 121 08 007. An Analysis on Local Government Role In Community Empowerment in Pinrang Regency (Case Study: End Child Poverty Schools in Lembang District), under the guidance of Dr.. H. A. Gau Kadir, MA and Dr.. Muh. Tamar M. Psi.**

This study aims to determine and analyze the role of local government in community empowerment, especially in reducing school dropouts in the Lembang District, Pinrang Regency.

This research was descriptive which gives a factual analysis of the role of local government in community empowerment especially about reducing school dropouts in the Lembang District, Pinrang Regency. Techniques of data collection are done through observation and interviews by selecting informants who played a part and technically involved in community empowerment, especially in reducing school dropouts. The data obtained were then analyzed qualitatively.

The results showed: (1) factual condition of non school children in District Lembang reached 979 children, consisting of primary school children numbered 166, Junior high school 372, and 441 senior high school kids. (2) Based on 5 cases which are found by the author in the field, factors that cause non-or dropping out of school children are: (a) Lack of family economy, (b) parents' educational background, (c) Lack of interest to school, (d) neighborhood conditions, (e) Playmate, (f) The public view of education. (3) The role of local governments in alleviating Pinrang's school dropouts children that occurred in Lembang District are: (a) create a policy to alleviate school dropouts children, (b) dissemination to the public, (c) provide assistance in the form of funds, (d) optimization of educational scholarships for pauper, and (e) Program assistance package. All this time, the government programs that are less well socialized to the society, the optimization of educational scholarships for the poor and education package assistance program. This happened because of a lack of cooperation with the relevant local government such as head of villages /villages chief with the Department of Education, Youth and Sports concerning about the data of the poor people and unequal information distribution to the public.

## DAFTAR ISI

	<b>Hal.</b>
Halaman Sampul .....	i
Halaman Pengesahan .....	ii
Halaman Penerimaan .....	iii
Kata Pengantar .....	iv
Abstrak .....	x
Daftar Isi .....	xii
Daftar Tabel .....	xiv
<b>Bab I Pendahuluan</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Kerangka Konsep .....	9
F. Metode Penelitian .....	10
1. Pendekatan Penelitian .....	10
2. Lokasi Penelitian .....	10
3. Teknik Pengumpulan Data .....	11
4. Sampel Sumber Data .....	12
5. Definisi Operasional.....	13
6. Analisis Data.....	16
<b>Bab II Tinjauan Pustaka</b>	
2.1. Tinjauan Tentang Peranan .....	17
2.2. Tinjauan Tentang Pemerintah Daerah .....	19
2.3. Tinjauan Tentang Pemberdayaan Masyarakat .....	29
2.4. Tinjauan Tentang Pendidikan .....	35
2.5. Tinjauan Tentang Anak Putus Sekolah .....	44

### **Bab III Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

3.1. Gambaran Umum Kecamatan Lembang .....	50
3.1.1. Kondisi Geografis .....	50
3.1.2. Keadaan Penduduk .....	52
3.1.3. Kondisi Sosial dan Budaya .....	54
3.1.4. Kondisi Pendidikan .....	55
3.2. Gambaran Umum Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pinrang .....	58
3.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pinrang .....	58
3.2.2 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pinrang .....	59
3.2.3 Program Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga .....	61

### **Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan**

4.1. Kondisi Obyektif (Gambaran Umum) Studi Anak Putus Sekolah di Kecamatan Lembang.....	62
4.2. Faktor-faktor yang Menyebabkan Anak Putus Sekolah .....	69
4.3. Peranan Pemerintah Daerah Dalam Mengentaskan Anak Putus Sekolah di Kecamatan Lembang .....	86

### **Bab V Kesimpulan dan Saran**

5.1. Kesimpulan .....	97
5.2. Saran.....	98

<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>100</b>
-----------------------------	------------

## DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

	Hal.
Gambar 1 .....	43
Tabel 3.1 Luas Kelurahan/desa di Kecamatan Lembang Tahun 2010 .....	51
Tabel 3.2 Pembagian Penduduk Menurut Kelurahan/Desa, Jenis Kelamin, dan Kepala Keluarga di Kecamatan Lembang Tahun 2010 .....	53
Tabel 3.3 Banyaknya Penduduk Menurut Agama Tiap Kelurahan/Desa di Kecamatan Lembang Tahun 2010 .....	55
Tabel 3.4 Jumlah Saran dan Prasarana Sekolah yang Ada di Kecamatan Lembang Tahun 2010 .....	56
Tabel 3.5 Jumlah Siswa/Peserta Didik di Kecamatan Lembang Tahun 2010 .....	57
Tabel 4.1 Perbandingan Anak Sekolah dan Anak Tidak dan Atau Putus Sekolah di Kecamatan Lembang tahun 2010 .....	63
Tabel 4.2 Data Anak Tidak dan Atau Putus Sekolah Berdasarkan Jenis Kelamin di Kecamatan Lembang Tahun 2010 .....	64

Tabel 4.3 Anak Tidak Dan Atau Putus Sekolah di

Kecamatan Lembang Berdasarkan Status

Pekerjaan Orang Tua Tahun 2010 ..... 65

Tabel 4.4 Anak Tidak dan Atau Putus Sekolah di

Kecamatan Lembang Berdasarkan

Tempat Tinggal Anak Tahun 2010 ..... 66

Tabel 4.5 Kondisi Anak Tidak dan Atau Putus Sekolah di

Kecamatan Lembang Berdasarkan History

Pendidikannya Tahun 2010 ..... 68

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pembangunan nasional yang dilaksanakan dewasa ini bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD RI 1945. Dalam usaha mencapai tujuan tersebut, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah. Upaya pembangunan yang dilakukan selama ini, dengan berbagai bentuk dan variasinya, pada dasarnya dilakukan guna meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Setiap pembangunan dilaksanakan di daerah, maka sudah selayaknya jika pemerintah daerah memegang posisi dominan yang lebih strategis baik dalam perencanaan, pendanaan ataupun pelaksanaan pembangunan itu sendiri. Hal itu didasarkan bahwa pemerintah daerah lebih dekat dengan rakyat dibandingkan dengan pemerintah pusat, disamping lebih memahami aspirasi masyarakat dan menuangkannya ke dalam proyek-proyek pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal itu sesuai dengan penjelasan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pada Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah

provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah.

Berdasarkan asas desentralisasi tentunya pemerintah daerah mempunyai kewenangan dalam mengurus daerahnya sendiri, sehingga pemerintah daerah kini lebih leluasa dalam mengelolah serta meningkatkan potensi yang di miliki daerahnya termasuk sumber daya manusia. Sehingga pemerintah daerah mempunyai peranan penting dalam memberdayakan masyarakat daerah karena pemerintah daerah yang lebih dekat dan mengetahui kondisi dan kebutuhan masyarakatnya. Ungkapan pemberdayaan masyarakat secara politik memberi peluang partisipasi bagi setiap masyarakat. Hal inilah sesuai dengan prinsip *good governance*<sup>1</sup> di mana kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat tentunya membutuhkan tingkat partisipasi masyarakat dan peran pemerintah daerah.

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam:

---

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000, merumuskan arti *Good Governance* sebagai berikut; "Kepemerintahan yang mengemban akan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Sedarmayanti, 2004, *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Bagian Kedua Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik)*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 4.

- a) Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat melainkan bebas dari kelaparan, beberapa dari kebodohan, bebas dari kesakitan;
- b) Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan;
- c) Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Bagaimana memberdayakan masyarakat merupakan satu masalah tersendiri yang berkaitan dengan hakikat *power* (daya). Pada dasarnya, daya atau *power* tersebut di miliki oleh setiap individu dan kelompok, akan tetapi kadar dari daya tersebut berbeda satu dengan yang lainnya. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait antara lain seperti pengetahuan, kemampuan, status, harta, kedudukan dan jenis kelamin. Faktor-faktor yang saling terkait tersebut pada akhirnya membuat hubungan antara individu dengan dikotomi subyek (dalam hal ini pemerintah daerah selaku penguasa) dan obyek (tentunya masyarakat sebagai yang dikuasai). Bentuk relasi sosial yang dicirikan dengan dikotomi subyek (pemerintah) dan

obyek (masyarakat) tersebut merupakan relasi yang ingin "diperbaiki" melalui proses pemberdayaan.<sup>2</sup>

Proses pemberdayaan masyarakat merupakan suatu program yang berkesinambungan, dalam memberdayakan masyarakat tentunya pemerintah daerah berperan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menuntut ilmu dengan bersekolah sebagai upaya peningkatan mutu masyarakat. Walaupun pemerintah daerah telah berupaya melakukan pemberdayaan masyarakat sudah lama tapi pemberdayaan ini akan tetap berlangsung selama masyarakat itu masih bertahan di suatu daerah dan mereka tetap berusaha memberdayakan diri sendiri demi meningkatkan taraf hidup mereka terutama dalam mewujudkan masyarakat yang bermutu dan berkualitas. Hal ini diharapkan agar masyarakat di setiap daerah terutama di daerah Kabupaten Pinrang merasa tidak terkucilkan dan pemerintah daerah juga dapat memberdayakan masyarakatnya di bidang pendidikan yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Hal ini tentunya sesuai dengan peranan pemerintah sebagai edukasional yang memberikan pengetahuan kepada masyarakat dalam membangkitkan kemampuan dan kesadarannya dalam memecahkan berbagai masalah yang dihadapinya dengan ilmu dan pengetahuan yang mereka miliki.

---

<sup>2</sup> Adi Fahrudin, *Pemberdayaan, Partisipasi, dan Penguatan Kapasitas Masyarakat*, Humaniora, Bandung, hlm. 49-51.

Jumlah penduduk Kabupaten Pinrang di tahun 2010 mencapai angka 351.042 jiwa dan jumlah rumah tangga yang berada di bawah garis kemiskinan mencapai angka 18.214 keluarga<sup>3</sup>. Kemiskinan yang terjadi tentunya menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat anak putus sekolah. Selain itu keinginan yang berasal dari diri sendiri dan pengaruh pergaulan untuk tidak bersekolah serta akses menuju sekolah merupakan faktor yang mempengaruhi tingginya jumlah anak putus sekolah. Ditambah sarana dan prasarana yang kurang memadai seperti alat-alat penunjang kreatifitas dan teknologi, dan kondisi ruang belajar yang rusak juga mengurangi minat peserta didik untuk melanjutkan pendidikannya.

Kabupaten Pinrang terbagi menjadi 12 Kecamatan salah satunya adalah Kecamatan Lembang. Saat ini Kabupaten Pinrang memiliki angka putus sekolah (APS) sekitar 3.769 anak dan Kecamatan yang paling tinggi angka putus sekolahnya adalah Kecamatan Lembang yang memiliki angka anak putus sekolah 979 anak. Kondisi demikian dapat dimaknai bahwa cukup banyak anak usia SD/MI (7-12 tahun) belum bersekolah. Angka putus sekolah di usia 7-12 tahun ini tentunya sangat memprihatinkan. Angka putus sekolah yang terjadi disebabkan karena faktor tingkat kemampuan masyarakat yang rendah dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk bersekolah.

---

<sup>3</sup> Badan Pusat Statistik, *Profil Kabupaten Pinrang Dalam Angka Tahun 2010*, Kabupaten Pinrang.

Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang bertanggung jawab dalam meningkatkan kesadaran masyarakat di Kecamatan Lembang mengenai pentingnya bersekolah sebagai upaya pemberdayaan masyarakat. Dan menciptakan masyarakat yang terampil, terdidik, dan berteknologi sebagai prasyarat mutlak pembentukan manusia yang bermutu dan berkualitas.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengajukan beberapa rumusan masalah mengenai analisis peranan pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Pinrang (Studi kasus pengentasan anak putus sekolah di Kecamatan Lembang) secara singkat sebagai berikut:

- 1) Bagaimana kondisi obyektif anak putus sekolah di Kecamatan Lembang?
- 2) Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya anak putus sekolah di Kecamatan Lembang?
- 3) Sejauh mana peranan pemerintah daerah dalam melakukan pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk bersekolah di Kecamatan Lembang?



### C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui kondisi obyektif anak putus sekolah di Kecamatan Lembang.
- 2) Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya anak putus sekolah di Kecamatan Lembang.
- 3) Untuk mengetahui Sejauh mana peranan pemerintah daerah dalam melakukan pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk bersekolah di Kecamatan Lembang.

### D. Manfaat Penelitian

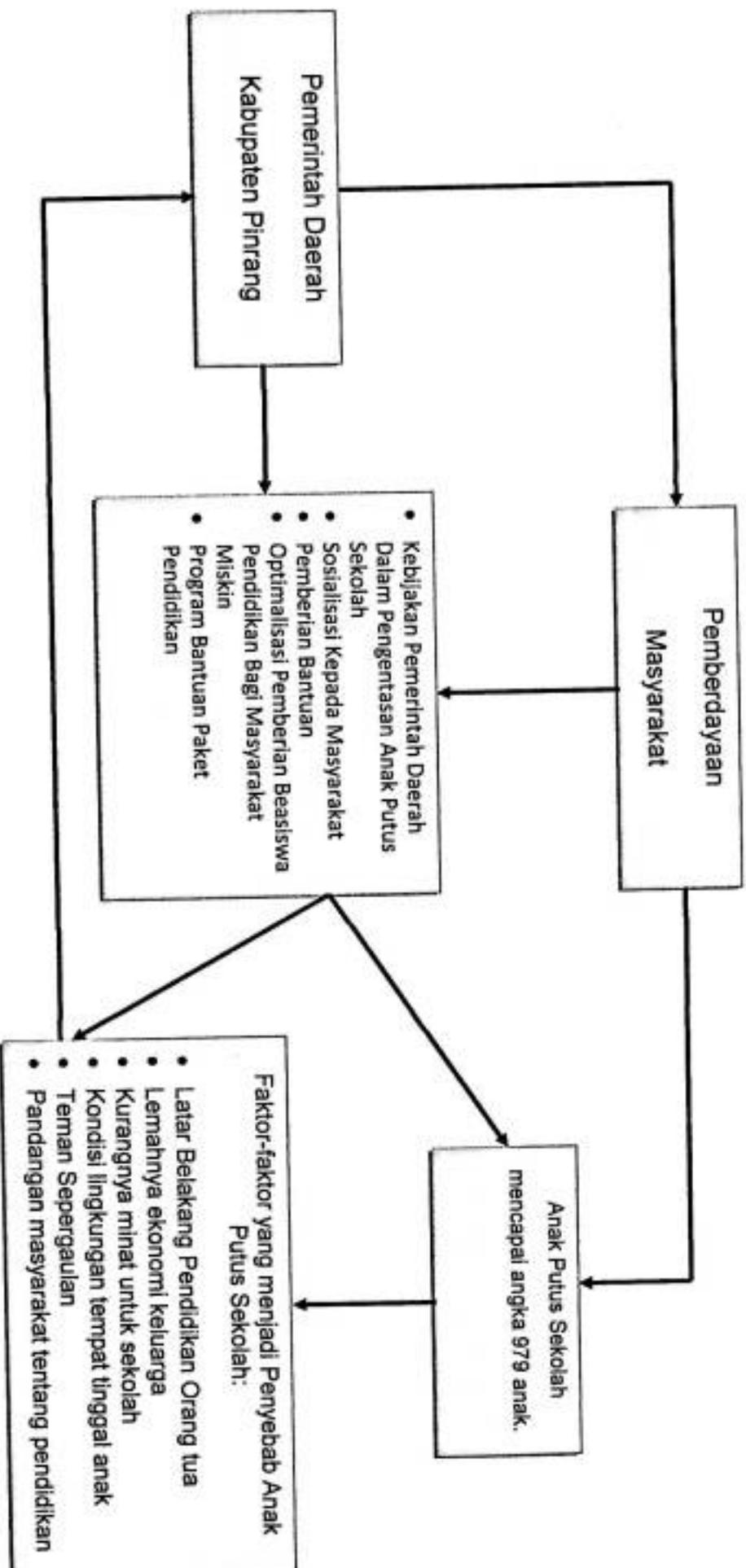
Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Sebagai bahan kemajuan ilmu, khususnya kajian ilmu sosial yang berkaitan dengan peranan pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan terutama dalam pengentasan anak putus sekolah.
- 2) Hasil dari penulisan ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk lebih memberdayakan masyarakat terutama di bidang pendidikan.

- 3) Hasil penulisan ini dapat dijadikan bahan bagi pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan dalam pendidikan terutama dalam mengatasi angka anak putus sekolah.
- 4) Sebagai bahan informasi bagi masyarakat untuk bisa lebih mandiri dan terus mengembangkan potensi yang dimilikinya untuk meningkatkan taraf hidup yang lebih baik.

## E. Kerangka Konsep

Secara lebih jelasnya untuk melihat bagaimana alur penulisan penulis tergambar dalam skema berikut ini:



## **F. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus, artinya penulis akan meneliti satu unit sosial yang berkaitan dengan fokus permasalahan secara lebih mendalam. Penulis menggunakan metode kualitatif karena permasalahan yang ada dinamis, kompleks dan penuh makna. Dan menggunakan tipe deskriptif yaitu dengan memberikan gambaran secara spesifik mengenai peranan pemerintah daerah Kabupaten Pinrang dalam hal pengentasan anak putus sekolah di Kecamatan Lembang. Selanjutnya, penulis bermaksud memahami situasi sosial secara mendalam yang terjadi di Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang.

### **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang, serta Dinas Sosial, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pinrang, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pinrang dan masyarakat Kecamatan Lembang. Dengan pertimbangan bahwa komponen-komponen tersebut berperan penting dalam proses pemberdayaan masyarakat dan pengentasan anak putus sekolah.



### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

#### 1. Penelitian Lapang

Penelitian lapang ini dimaksudkan bahwa penulis langsung melakukan penelitian pada lokasi atau objek yang telah ditentukan. Penelitian lapang ditempuh dengan cara sebagai berikut :

- a) Observasi yaitu pengamatan terhadap obyek secara langsung;
- b) Interview yaitu wawancara langsung dengan infoman yang dianggap dapat memberikan informasi;

#### 2. Studi Pustaka (*library research*).

Pengumpulan data menggunakan studi pustaka yaitu pengumpulan data dengan membaca buku, surat kabar, dokumen-dokumen, Undang-undang dan media informasi lain yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

#### 4. Sampel Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan informan dalam memperoleh data yang dibutuhkan. Pemilihan Informan ini melalui pertimbangan bahwa orang yang dipilih dapat memberikan informasi yang jelas sesuai dengan tujuan dan permasalahan yang sedang diteliti. Dengan demikian yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bupati Pinrang;
2. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pinrang;
3. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pinrang;
4. Anggota DPRD Kabupaten Pinrang (Ketua/Anggota DPRD Kabupaten Pinrang Komisi I);
5. Kepala Sekolah tingkat SD sebanyak 5 orang, tingkat SMP sebanyak 3 orang, dan tingkat SMA sebanyak 1 orang;
6. Dan masyarakat Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang sebanyak 30 orang.

Dalam penelitian, selanjutnya dilapangan memungkinkan informan bertambah (*snowball sampling*) disebabkan informan tersebut dapat memberikan informasi mengenai data penulisan yang dibutuhkan.



## 5. Definisi Operasional

Dalam rangka memudahkan proses analisa data yang diperoleh, maka definisi konsep yang ada dioperasionalkan ke dalam indikator-indikator agar mampu menggambarkan dan menjelaskan gejala-gejala yang dapat diuji kebenarannya. Adapun operasionalisasi konsep dalam penulisan ini meliputi hal-hal sebagai berikut :

### 1. Peranan pemerintah

Peranan pemerintah daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan atau kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah (Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga) sehubungan dengan tugas dan fungsi pemerintah daerah sebagai pelaksana pemerintahan di tingkat daerah dan pengambil kebijakan yang ada di daerah Kabupaten Pinrang khususnya Kecamatan Lembang dalam mengentaskan anak putus sekolah.

Hal ini dapat diukur dengan indikator-indikator sebagai berikut:

- Kebijakan-kebijakan pemerintah daerah yang berkaitan dengan pengentasan anak putus sekolah dalam bentuk peraturan daerah dan Keputusan Bupati Pinrang;
- Bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat dan lembaga pendidikan di setiap jenjangnya berupa motivasi-motivasi dalam melanjutkan

sekolah sebagai upaya pengentasan anak putus sekolah di Kecamatan Lembang.

## 2. Proses Pemberdayaan masyarakat

Dalam proses pemberdayaan masyarakat melalui beberapa tahapan yaitu:

### ➤ Pemberdayaan Melalui Kebijakan Dan Perencanaan

Dilakukan dengan merubah struktur dan institusi-institusi yang ada agar terjadi akses yang sesuai dengan sumber-sumber dan pelayanan-pelayanan, serta munculnya partisipasi dalam kehidupan masyarakat.

### ➤ Pemberdayaan Melalui Pendidikan Dan Penyadaran

Menekankan pada pentingnya proses pendidikan sehingga pihak yang diberdayakan memperoleh kemampuan-kemampuan. Cara ini dilakukan dengan memberikan pengetahuan akan berbagai hal yang menjadi kendali baik struktural maupun kendala-kendala kemasyarakatan, juga memberikan keterampilan untuk berkarya secara efektif menuju perubahan.

Pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan masyarakat dicapai melalui penerapan pendekatan pemberdayaan yaitu:

#### 1. Pemungkinan

Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan sebaiknya mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat.

## 2. Penguatan

Memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan dapat menumbuhkembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka.

## 3. Perlindungan

Melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok yang kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang antara yang kuat dan lemah. Pemberdayaan dapat diarahkan penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.

## 4. Penyokongan

Memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan sebaiknya menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi semakin lemah dan terpinggirkan.

## 5. Pemeliharaan

Memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

## 6. Analisis Data

Penulis melakukan analisis terhadap data yang telah dikumpulkan. kemudian dianalisis dengan pendekatan model interaktif yang terdiri dari tiga hal utama yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Proses reduksi diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses reduksi data bukanlah proses yang sekali jadi, tetapi proses yang berulang selama proses penulisan ini berlangsung. Maka dalam mereduksi data penulis memfokuskan pada pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk bersekolah. Langkah berikutnya setelah direduksi adalah penyajian data yang dilakukan dalam bentuk uraian singkat mengenai fenomena yang terjadi di masyarakat. Selanjutnya penulis akan menarik kesimpulan berdasarkan hasil observasi dan wawancara di lapangan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini akan diuraikan konsep-konsep yang disesuaikan berdasarkan topik, judul, fokus penelitian. Konsep-konsep ini menjadi landasan atau kerangka berpikir dalam perumusan pelaksanaan studi, kajian, dan penelitian yang akan dilaksanakan.

#### 2.1 Tinjauan tentang Peranan

Berdasarkan kamus ilmiah populer yang disusun oleh Tim Prima Pena memberikan pengertian peran dan peranan sebagai berikut:

"Peran" yakni laku; hal berlaku atau bertindak; pemeran, pelaku; pemain (film atau drama). Sedangkan peranan adalah fungsi, kedudukan; bagian kedudukan."<sup>4</sup>

Berbicara tentang peranan, maka kita tidak menghindarkan diri dari persoalan status atau kapasitas seseorang atau suatu lembaga karena setiap status sosial atau jabatan yang diberikan kepada setiap orang atau kepada suatu institusi pasti disertai dengan kewenangan. Kewenangan atau peran yang harus dilaksanakan oleh orang atau institusi tersebut.

---

<sup>4</sup> Tim Prima Pena, *Kamus Ilmiah Populer*, 2006, Gitamedia Pres, Jakarta, hal. 367.

Menurut Selo Sumarjono, peran (*role*) adalah aspek dinamis dari kehidupan (*status*) atau pola tingkah laku yang ada hubungannya dengan kehidupan sosial seseorang, antara status dan role sangat sukar dipisahkan. Tidak ada kedudukan tanpa peran, dan tidak ada peran tanpa kedudukan.<sup>5</sup>

Menurut pengertian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Balai Pustaka, menyebutkan pengertian peranan sebagai berikut:

- a. Peran adalah pemain yang diandaikan dalam sandiwara maka dia adalah pemain sandiwara atau pemain utama;
- b. Peran adalah bagian yang dimainkan seorang pemain dalam sandiwara, ia berusaha bermain dengan baik dalam semua peran yang dibebankan kepadanya;
- c. Peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.

Lebih lanjut lagi, M. Rusli Karim memberikan batasan tentang peran di antaranya sebagai berikut:

- a. Peran adalah norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau kedudukan seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.

---

<sup>5</sup> Selo Sumarjono, *Sistem Sosial Indonesia*, 1974, Rineka Cipta, Yogyakarta, hal. 261.

- b. Peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam kehidupan masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peran juga dapat diartikan sebagai perilaku penting bagi struktur sosial.<sup>6</sup>

Melihat dari beberapa pengertian peranan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai pengertian peranan dalam hal ini peranan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan wewenang yang dibebankan kepadanya yang sesuai dengan tanggung jawab organisasi tersebut, untuk dapat melaksanakan sesuai dengan target dan tujuan yang telah ditetapkan.

## 2.2 Tinjauan tentang Pemerintah Daerah

Pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan *civil* bagi setiap orang melalui hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan, sesuai dengan tuntutan yang (harapan) yang diperintah. Dalam hubungan itu, bahkan warga Negara asing atau siapa saja yang pada suatu saat berada secara sah (legal) di wilayah Indonesia, berhak menerima layanan *civil* (sipil) tertentu, dan pemerintah wajib melayaninya.

---

<sup>6</sup> Whanty Damayanti, *Peranan Pemerintah Dalam Meningkatkan Kecerdasan Anak Didik Pada Lembaga Pendidikan Swasta Di Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara*, 2006. Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Hasanuddin.



Baik pemerintah maupun yang diperintah berada pada berbagai posisi dan melakukan berbagai peran satu terhadap yang lain, baik timbale balik maupun searah, seimbang maupun tidak. Hal inilah yang membentuk hubungan pemerintahan.

Berbagai konsep tentang pemerintah antara lain:

1. **Pemerintah dalam arti sempit** yaitu lembaga Negara yang memegang kekuasaan eksekutif saja.
2. **Pemerintah dalam arti luas** adalah semua lembaga Negara yang oleh konstitusi Negara yang bersangkutan disebut sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan. Hal ini telah diatur dalam UUD 1945, di mana dinyatakan bahwa Kekuasaan pemerintahan meliputi fungsi legislatif dan fungsi eksekutif. Bahkan kepada presiden dilimpahkan "*concentration of power and responsibility* (terpusat pada kekuasaan dan tanggung jawab)".
3. **Pemerintah dalam konsep pemerintah pusat**, yaitu pengguna kekuasaan Negara pada tingkat pusat (tertinggi); pada umumnya dihadapkan pada konsep pemerintah daerah.
4. **Pemerintah dalam konsep pemerintah daerah**. Berbeda dengan pemerintah pusat yang dianggap mewakili Negara, pemerintah daerah dianggap mewakili masyarakat, karena

daerah adalah masyarakat hukum yang tertentu batas-batasnya.

Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pelaksanaan pemerintahan daerah terdapat 3 (tiga) asas yang menjadi landasan bagi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yaitu sebagai berikut:

#### Penerapan Asas Desentralisasi

Makna dari asas desentralisasi dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- 1) Desentralisasi sebagai penyerahan kewenangan dan kekuasaan;
- 2) Desentralisasi sebagai pelimpahan kekuasaan dan kewenangan;
- 3) Desentralisasi sebagai pembagian, penyebaran, pemencaran, dan pemberrian kekuasaan dan kewenangan;
- 4) Desentralisasi sebagai sarana dalam pembagian dan pembentukan daerah pemerintahan.

Selain itu beberapa ahli mencoba memberikan pandangan mengenai makna dari asas desentralisasi.

**Pertama**, pandangan pakar yang menganggap bahwa desentralisasi merupakan penyerahan kekuasaan dan kewenangan. Pandangan ini sesuai dengan Hazairin, Kartasapoetra, Koswara, Sekigman, dan *Van Den Berg* yang menganggap bahwa desentralisasi merupakan penyerahan kekuasaan dan kewenangan (urusan) pemerintah pusat kepada daerah. Sementara *De Rooter* berpandangan bahwa penyerahan kekuasaan atau wewenang ini terjadi bukan pada pemerintah pusat, tetapi dari badan yang lebih tinggi kepada badan yang lebih rendah. Dalam arti ketatanegaraan, yang dimaksud dengan desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah atau daerah tingkat atas kepada daerah menjadi urusan rumah tangganya.<sup>7</sup>

Pemaknaan desentralisasi dibedakan dalam empat hal yakni:

- 1) Kewenangan untuk mengambil keputusan diserahkan dari seorang pejabat administrasi/pemerintah kepada yang lain;
- 2) Pejabat yang menyerahkan itu mempunyai lingkungan pekerjaan yang lebih luas daripada pejabat yang diserahkan kewenangan tersebut;

---

<sup>7</sup> Agussalim Andi Gadjong, *Pemerintahan Daerah*, 2007, Ghalia Indonesia, Bogor, hal. 80.

- 3) Pejabat yang menyerahkan kewenangan tidak dapat memberi perintah kepada pejabat yang telah disertai kewenangan itu, mengenai pengambilan keputusan atau isi keputusan itu, serta;
- 4) Pejabat yang menyerahkan kewenangan itu tidak dapat menjadikan keputusannya sendiri sebagai pengganti keputusan yang telah diambil, tidak dapat secara bebas menurut pilihan sendiri sebagai pengganti keputusan yang telah disertai kewenangan itu dengan orang lain, tidak dapat menyingkirkan pejabat yang telah disertai kewenangan itu dari tempatnya.

**Kedua**, pandangan pakar yang menganggap bahwa desentralisasi merupakan pelimpahan kekuasaan dan kewenangan dapat dilihat dari pandangan *Logemann* dan *Litvack* bahwa desentralisasi adalah sebagai pelimpahan kewenangan dari pusat ke daerah, tetapi *Litvack* lebih jauh memaknai pelimpahan karena juga bisa kepada sektor swasta. Sementara *Ateng* menjadikan saran dekonsentrasi sebagai pelimpahan kewenangan dalam rangka desentralisasi.<sup>8</sup>

Berbeda dengan *G Shabbir Cheema*, *John R Nellis*, dan *Dennis A Rondinelli* memandang bahwa pelimpahan kewenangan dari pusat ke daerah itu berkisar pada perencanaan dan pengambilan keputusan. Menurut *Gie* bahwa desentralisasi di bidang pemerintahan diartikan sebagai pelimpahan

---

<sup>8</sup> *Ibid.* hal. 81.

wewenang pemerintah pusat kepada satuan-satuan organisasi pemerintahan untuk menyelenggarakan segenap kepentingan setempat dari kelompok yang mendiami suatu wilayah.<sup>9</sup>

**Ketiga**, pandangan pakar yang menganggap bahwa desentralisasi dalam system pemerintahan merupakan pembagian, penyebaran, pemencaran, pemberian kekuasaan, dan kewenangan dapat dilihat dari pandangan yang dikemukakan oleh *Duchacek*, *Maryanov*, dan *Mawhood*, bahwa masalah desentralisasi berujung pada pembagian kekuasaan atau kewenangan dalam suatu pemerintahan. Di sisi lain, *Tresna* berpandangan bahwa desentralisasi diartikan sebagai pemberian kekuasaan mengatur diri kepada daerah-daerah dalam lingkungannya guna mewujudkan asas demokrasi di dalam pemerintahan Negara.<sup>10</sup>

**Keempat**, pandangan pakar yang menganggap bahwa desentralisasi merupakan sarana dalam pembagian dan pembentukan daerah dapat dilihat dari pandangan *Aldefer* yaitu desentralisasi adalah pembentukan daerah otonomi dengan kekuasaan-kekuasaan tertentu dan bidang-bidang kegiatan tertentu yang diselenggarakan berdasarkan pertimbangan, inisiatif, dan administrasi sendiri. Jadi, desentralisasi menyangkut pembentukan daerah

---

<sup>9</sup> *Ibid*

<sup>10</sup> *Ibid* hal. 83.



otonom dengan dilengkapi kewenangan-kewenangan tertentu dan bidang-bidang kegiatan tertentu.<sup>11</sup>

Dari beberapa pandangan pakar di atas dengan jelas menafsirkan bahwa makna desentralisasi melahirkan sisi penyerahan kewenangan, pembagian kekuasaan, pendelegasian kekuasaan, pendelegasian kewenangan, dan pembagian daerah dalam struktur pemerintahan di Negara kesatuan. Penyerahan, pendelegasian, dan pembagian kewenangan dengan sendirinya menciptakan kewenangan pada pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah, yang didahului pembagian daerah pemerintahan dalam bingkai daerah otonom.

#### Penerapan Asas Dekonsentrasi

Pendelegasian wewenang pada dekonsentrasi hanya bersifat menjalankan atau melaksanakan peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan pusat lainnya yang tidak berbentuk peraturan, yang tidak dapat berprakarsa menciptakan peraturan dan atau membuat keputusan bentuk lainnya untuk kemudian dilaksanakannya sendiri pula. Pendelegasian dalam dekonsentrasi berlangsung antara petugas perorangan pusat kepada petugas perorangan pusat di pemerintahan daerah.

---

<sup>11</sup> *Ibid* hal. 84.

Pada hakikatnya, alat-alat pemerintah pusat ini melakukan pemerintahan sentral di daerah-daerah. Penyerahan kekuasaan pemerintah pusat kepada alatnya di daerah karena meningkatnya kemajuan masyarakat di daerah-daerah. Sementara, Bayu mengartikan dekonsentrasi sebagai desentralisasi jabatan (*ambtelijke decentralisatie*), bahwa pemencaran kekuasaan dari atasan kepada bawahan sehubungan dengan kepegawaian atau jabatan (*ambt*) dengan maksud untuk meningkatkan kelancaran kerja.<sup>12</sup>

Dekonsentrasi merupakan salah satu jenis desentralisasi, dekonsentrasi sudah pasti desentralisasi, tetapi desentralisasi tidak selalu berarti dekonsentrasi. *Stroink* berpendapat bahwa dekonsentrasi merupakan perintah kepada pejabat pemerintah atau dinas-dinas yang bekerja dalam hierarki dengan suatu badan pemerintah untuk mengindahkan tugas-tugas tertentu dibarengi dengan pemberian hak mengatur dan memutuskan beberapa hal tertentu dengan tanggung jawab terakhir tetap berada pada badan pemerintah sendiri.<sup>13</sup>

Pemaknaan asas dekonsentrasi berdasarkan dengan undang-undang pemerintahan daerah yang pernah berlaku dan berlaku positif sampai sekarang ini, antara lain UU No. 1/1945, UU No. 22/1948, UU No. 1/1957, Penpres RI No. 6/1959, dan UU No 18/1965 tidak menegaskan secara jelas

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hal. 90.

<sup>13</sup> *Ibid*

dan eksplisit dalam batang tubuhnya, sedangkan UU No. 5/1974, UU No. 22/1999, dan UU No 32/2004 menegaskan secara jelas bahwa dekonsentrasi sebagai pelimpahan wewenang pemerintahan. Jadi, dimensi mana yang tercipta adalah adanya pelimpahan kewenangan yang secara fungsional dari pejabat atasan (dari pemerintah pusat kepada pejabat di daerah).

#### Penerapan Asas Tugas Pembantuan (*Medebewind*)

Asas tugas pembantuan ini bersifat "membantu" dan tidak dalam konteks hubungan "atasan-bawahan", tetapi dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah tidak mempunyai hak untuk menolak. Hubungan ini timbul oleh atau berdasarkan ketentuan hukum atau perundang-undangan. Pada dasarnya, tugas pembantuan adalah tugas melaksanakan peraturan perundang-undang tingkat lebih tinggi. Daerah terikat melaksanakan peraturan perundang-undangan, termasuk yang diperintahkan atau diminta dalam rangka tugas pembantuan. Pada UU No. 32 tahun 2004 menegaskan dalam Bab I, Pasal 1 butir 9 bahwa tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan atau Desa dari pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan atau Desa serta dari pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Tugas pembantuan dapat dijadikan sebagai terminal menuju "penyerahan penuh" suatu urusan kepada daerah atau tugas pembantuan merupakan tahap awal sebagai persiapan menuju kepada penyerahan penuh. Kaitan tugas antara tugas pembantuan dengan desentralisasi dalam melihat hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, bertolak dari:

- 1) Tugas pembantuan adalah bagian dari desentralisasi. Jadi pertanggungjawaban mengenai penyelenggaraan tugas pembantuan adalah tanggung jawab daerah yang bersangkutan;
- 2) Tidak ada perbedaan pokok antara otonomi dan tugas pembantuan karena dalam tugas pembantuan terkandung unsure otonomi, daerah punya cara-cara sendiri melaksanakan tugas pembantuan; serta
- 3) Tugas pembantuan sama halnya dengan otonomi, yang mengandung unsur penyerahan bukan penugasan. Yang dapat dibedakan secara mendasar bahwa kalau otonomi adalah penyerahan penuh, maka tugas pembantuan adalah penyerahan tidak penuh.

Peranan pemerintah daerah berarti kedudukan pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*. Selanjutnya peran pemerintah daerah adalah segala

sesuatu yang dilakukan dalam bentuk cara tindak baik dalam rangka melaksanakan otonomi daerah sebagai suatu hak, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan semua hak, wewenang dan kewajibannya tentunya harus sesuai dengan peranannya yakni berdasarkan kedudukannya sehingga tidak terjadi tumpang tidak di dalam ranah pemerintahan. Sebagai daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### 2.3 Tinjauan tentang Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan menurut asal katanya *empowering* dari bahasa Inggris *empower* yang artinya "menugaskan atau memberi wewenang". Konsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan masyarakat selalu dihubungkan dengan konsep mandiri, partisipasi jaringan kerja, dan keadilan dan diletakkan pada kekuatan tingkat individu dan sosial. Menurut *Mc Ardle* (1989) yang mengartikan pemberdayaan sebagai proses pengambilan keputusan oleh orang-orang yang secara konsekuen melaksanakan

keputusan tersebut. Orang-orang yang telah mencapai tujuan kolektif diberdayakan melalui kemandiriannya, bahkan merupakan "keharusan" untuk lebih diberdayakan melalui usaha mereka sendiri dan akumulasi pengetahuan, keterampilan serta sumber lainnya dalam rangka mencapai tujuan.<sup>14</sup>

Selanjutnya *Shardlow* (1998:32) melihat bahwa berbagai pengertian yang ada mengenai pemberdayaan, pada intinya membahas bagaimana individu, kelompok ataupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka.<sup>15</sup>

Kata pemberdayaan (*empowerment*) mengesankan arti adanya sikap mental yang tangguh. Proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan yaitu:

1. Kecenderungan primer, proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya (*survival of the fittes*). Proses ini dapat dilengkapi dengan upaya membangun

---

<sup>14</sup> Sedarmayanti, *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Bagian Kedua: Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik)*, 2004, Mandar Maju, Bandung, hal. 117.

<sup>15</sup> Isbandi Rukmianto Adi, 2008, *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 78.

aset material guna mendukung pembangunan kemandirian melalui organisasi;

2. Kecenderungan sekunder, menekankan pada proses menstimulasi, mendorong, atau memotivasi agar individu mempunyai kemampuan/keberdayaan untuk menentukan yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog.

Secara konseptual, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.

Menurut Sumodingrat (1997) yang memberikan pengertian pemberdayaan masyarakat menyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu masyarakat yang belum berkembang sebagai pihak yang harus diberdayakan, dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan.<sup>16</sup>

Selanjutnya Moebyarto (1985) menjelaskan bahwa, pemberdayaan masyarakat mengacu kepada kemampuan masyarakat untuk mendapatkan dan memanfaatkan akses dan kontrol atas sumber hidup yang penting. Proses pemberdayaan merupakan wujud perubahan sosial yang menyangkut relasi antara lapisan sosial, sehingga kemampuan individu "senasib" untuk

---

<sup>16</sup> Adi Fahrudin, *op.cit.*, hal 47

saling berkumpul dalam suatu kelompok cenderung dinilai sebagai bentuk pemberdayaan yang paling efektif.<sup>17</sup>

Pemberdayaan masyarakat mengandung arti mengembangkan kondisi dan situasi sedemikian rupa sehingga masyarakat memiliki daya dan kesempatan untuk mengembangkan kehidupannya. Sebaiknya masyarakat harus terlibat dalam proses tersebut sehingga mereka dapat lebih memperhatikan hidupnya untuk memperoleh rasa percaya diri, memiliki harga diri dan pengetahuan untuk mengembangkan keahlian baru. Prosesnya dilakukan secara kumulatif sehingga semakin banyak keterampilan yang dimiliki seseorang, semakin baik kemampuan berpartisipasinya.

Pemerintah sebagai 'agen perubahan' dapat menerapkan kebijakan pemberdayaan masyarakat dengan tiga arah tujuan, yaitu *enabling*, *empowering*, dan *protecting*. *Enabling* maksudnya menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang. Sedangkan *empowering*, bertujuan untuk memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh rakyat dengan menerapkan langkah-langkah nyata, yakni dengan menampung berbagai masukan dan menyediakan prasarana dan sarana yang diperlukan. *Protecting*, artinya melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah.

---

<sup>17</sup> *Ibid.* hal 49.

Untuk meningkatkan partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri dan masyarakatnya merupakan unsur yang penting. Dengan sudut pandang demikian, maka pemberdayaan masyarakat amat erat kaitannya dengan pematapan, pembudayaan dan pengamalan demokrasi. *Friedmann* (1994:76) mengemukakan:

"Pendekatan pemberdayaan pada intinya memberikan tekanan pada otonomi pengambilan keputusan dari suatu kelompok masyarakat yang berlandaskan pada sumber daya pribadi, langsung (melalui partisipasi) demokratis dan pembelajaran sosial melalui pengalaman langsung".<sup>18</sup>

Selanjutnya *Friedmann* dalam hal ini menegaskan bahwa pemberdayaan masyarakat tidak hanya sebatas ekonomi saja tetapi juga secara politis sehingga pada akhirnya masyarakat akan memiliki posisi tawar-menawar (*bergaining position*) baik secara nasional maupun internasional. Sebagai titik fokus dari pemberdayaan ini adalah aspek lokalitas, sebab *civil society* akan merasa lebih siap diberdayakan lewat isu-isu lokal. *Friedmann* mengingatkan bahwa adalah sangat tidak realistis apabila kekuatan-kekuatan ekonomi dan struktur-struktur di luar *civil society* diabaikan. Sedangkan proses pemberdayaan bisa dilakukan melalui individu maupun kelompok, namun pemberdayaan melalui kelompok mempunyai keunggulan yang lebih

---

<sup>18</sup> Pembangunan pemberdayaan: enabling, empowering and protecting, 28 September 2011. (<http://www.pemberdayaan.com>).

manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Dengan visi pendidikan tersebut, pendidikan nasional mempunyai misi sebagai berikut:

1. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia;
2. Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar;
3. Meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral;
4. Meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap dan nilai berdasarkan standar nasional dan global;
5. Memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.

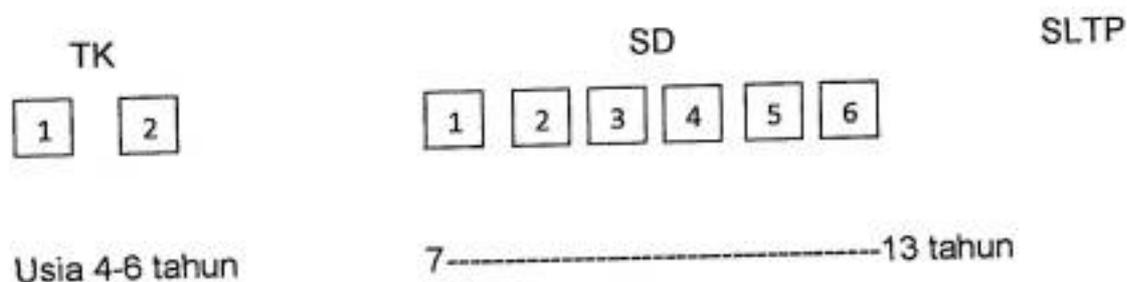
Dalam menyelenggarakan sistem pendidikan terdapat jenjang pendidikan yang dilalui oleh peserta didik. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan

peserta didik. Tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan. Jenjang pendidikan sekolah terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Di samping jenjang pendidikan itu dapat didalam pendidikan prasekolah yang tidak merupakan prasyarat untuk memasuki pendidikan dasar.

a. Pendidikan Dasar

Pendidikan dasar adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan keterampilan, menambahkan sikap dasar yang diperlukan dalam masyarakat, serta dipersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan menengah. Pendidikan dasar pada prinsipnya merupakan pendidikan memberikan bekal dasar bagi perkembangan kehidupan, baik untuk pribadi maupun untuk masyarakat. Karena itu, bagi setiap warga Negara harus disediakan kesempatan untuk memperoleh pendidikan dasar.

Gambar 1



b. Pendidikan Menengah

Pendidikan menengah adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan mengadakan hubungan timbal balik, dengan lingkungan sosial budaya dan alam sekitar, serta dapat mengembangkan kemampuan lebih lanjut dalam dunia kerja atau dunia pendidikan tinggi. Pendidikan menengah terdiri dari pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan.

c. Pendidikan Tinggi

Pendidikan tinggi adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki tingkat kemampuan tinggi yang bersifat akademik dan professional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam rangka pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan manusia.

## 2.5 Tinjauan tentang Anak Putus Sekolah

Anak putus sekolah adalah keadaan dimana anak mengalami keterlantaran karena sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak.

Undang-undang nomor 4 tahun 1979, anak terlantar diartikan sebagai anak yang orang tuanya karena suatu sebab, tidak mampu memenuhi kebutuhan anak sehingga anak menjadi terlantar.

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 bahwa anak terlantar yakni anak yang kebutuhannya tidak terpenuhi secara wajar, baik kebutuhan fisik, mental, spiritual maupun sosial.

Menurut Departemen Pendidikan di Amerika Serikat (*MC Millen Kaufman, dan Whitener, 1996*) mendefinisikan bahwa anak putus sekolah adalah murid yang tidak dapat menyelesaikan program belajarnya sebelum waktunya selesai atau murid yang tidak tamat menyelesaikan program belajarnya.<sup>26</sup>

Anak putus sekolah terjadi karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat mengenai fungsi sekolah. Adapun fungsi dari sekolah menurut Prof. Dr. S. Nasution, M.A antara lain:

#### A. Sekolah Mempersiapkan Anak Untuk Suatu Pekerjaan

Anak yang telah menamatkan sekolah diharapkan sanggup melakukan pekerjaan sebagai mata pencaharian atau setidaknya mempunyai dasar untuk mencari nafkahnya. Makin tinggi pendidikan, makin besar harapannya memperoleh pekerjaan yang baik. Ijazah masih tetap dijadikan

---

<sup>26</sup> Pusat Makalah Idris: Anak Putus Sekolah, 10 Desember 2011. ([http://www. Definisi Anak Putus Sekolah.com](http://www.DefinisiAnakPutusSekolah.com)).

syarat penting untuk suatu jabatan, walaupun ijazah itu sendiri belum menjamin kesiapan seseorang untuk melakukan pekerjaan tertentu. Akan tetapi dengan ijazah yang tinggi seorang dapat memahami dan menguasai pekerjaan kepemimpinan atau tugas lain yang dipercayakan kepadanya. Memiliki ijazah perguruan tinggi merupakan bukti akan kesanggupan intelektualnya untuk menyelesaikan studinya yang tidak mungkin dicapai oleh orang yang rendah kemampuannya. Sekolah yang ditempuh seseorang banyak menentukan pekerjaan yang dilakukannya oleh seseorang.

#### B. Sekolah Memberikan Keterampilan Dasar

Orang yang telah bersekolah setidaknya-tidaknya pandai membaca, menulis, dan berhitung yang diperlukan dalam tiap masyarakat modern seperti saat ini. Selain itu diperoleh sejumlah pengetahuan lain seperti sejarah, geografi, kesehatan, kewarganegaraan, fisika, biologi, bahasa, dan lain-lain yang membekali anak untuk melanjutkan pelajarannya, atau memperluas pandangan dan pemahamannya tentang masalah-masalah dunia dan perkembangan zaman.

#### C. Sekolah Membuka Kesempatan Memperbaiki Nasib

Sekolah sering dipandang sebagai jalan bagi mobilitas sosial. Melalui pendidikan orang dari golongan rendah dapat meningkat ke golongan yang lebih tinggi. Orang tua mengharapkan agar anak-anak mereka mempunyai

nasib yang lebih baik dari mereka. Sehingga orang tua yang mempunyai kesadaran tentang pentingnya sekolah akan menyekolahkan anak mereka hingga perguruan tinggi dan mencapai cita-cita anak mereka. Karena gelar akademis sangat membantu untuk menduduki tempat terhormat dalam dunia pekerjaan. Mereka yang telah menduduki tempat yang tinggi memandang pendidikan tinggi sebagai syarat mutlak untuk mempertahankan status sosialnya.

#### D. Sekolah Menyediakan Tenaga Pembangunan

Bagi daerah yang mempunyai kekayaan alam yang sangat mendukung tentunya membutuhkan tenaga ahli dalam mengelolah kekayaan alam tersebut. Maka dari itu pendidikan dipandang sebagai alat yang paling ampuh untuk menyiapkan tenaga yang terampil dan ahli dalam sektor pembangunan. Jadi, wajar saja apabila manusia dianggap sumber utama bagi setiap pembangunan.

#### E. Sekolah Membantu Memecahkan Masalah-Masalah Sosial

Masalah-masalah sosial diharapkan dapat diatasi dengan mendidik generasi muda untuk mengelakkan atau mencegah penyakit-penyakit sosial seperti kejahatan, pertumbuhan penduduk yang melewati batas, perusakan lingkungan, kecelakaan lalu lintas, narkoba dan sebagainya.

#### F. Sekolah Membentuk Manusia Yang Sosial

Pendidikan diharapkan membentuk manusia sosial, yang dapat bergaul dengan sesama manusia sekalipun berbeda agama, suku-bangsa, pendirian, dan sebagainya. ia juga harus dapat menyesuaikan diri dalam situasi sosial yang berbeda-beda.

Kalau diselidiki tentu akan ditemukan bermacam-macam alasan lain mengapa orang tua menyekolahkan anaknya, misalnya menyekolahkan anak gadisnya sampai ada yang meminangnya, atau menyerahkan anaknya kedalam pengawasan guru karena lebih sulit mengurusnya sendiri di rumah, dan sebagainya.

#### G. Sekolah Merupakan Alat Mentransformasi Kebudayaan

Sekolah, terutama perguruan tinggi diharapkan menambah pengetahuan dengan mengadakan penemuan-penemuan baru yang dapat membawa perubahan dalam masyarakat. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa perubahan yang besar di dunia ini.

#### H. Fungsi-fungsi Sekolah Lainnya

Sekolah dapat pula dipandang sebagai tempat menitipkan anak, khususnya anak-anak pra-sekolah. Juga perguruan tinggi dapat dipandang sebagai tempat penitipan pemuda di mana mereka lebih baik diawasi daripada di luar sekolah, sambil menunggu waktunya mereka mendapat pekerjaan. Bagi mahasiswa sekolah juga merupakan kesempatan untuk mendapatkan jodoh.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> S. Nasution, *Sosiologi Pendidikan*, 2010, PT Bumi Aksara, Jakarta, hal 14.

## BAB III

### Gambaran Umum Lokasi Penelitian

#### Gambaran Umum Kecamatan Lembang

##### 3.1.1 Kondisi Geografis

Kecamatan Lembang adalah salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Pinrang dan memiliki 12 Desa dan 2 Kelurahan yang tersebar. Di lihat dari keadaan alamnya, Kecamatan Lembang terdiri dari daerah pegunungan, daratan rendah dan pesisir pantai. Batas-batas Kecamatan Lembang adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Tana Toraja;
- Sebelah Selatan : Kecamatan Duampanua dan Kecamatan Batu Lappa;
- Sebelah Timur : Kabupaten Enrekang;
- Sebelah Barat : Selat Makassar dan Provinsi Sulawesi Barat.

Jarak Kecamatan Lembang dari ibukota Kabupaten Pinrang adalah  $\pm$  37 km, dan terletak  $\pm$  220 km dari kota Makassar ibukota Provinsi Sulawesi selatan. Luas wilayah Kecamatan Lembang 733,09 km<sup>2</sup> yang terbagi 12 Desa dan 2 Kelurahan.

Pembagian wilayah menurut desa di Kecamatan Lembang dapat di lihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1

Luas Kelurahan/Desa di Kecamatan Lembang Tahun 2010

No	Kelurahan/Desa	(Luas) km <sup>2</sup>	J A R A K (Km)	
			Dari Ibukota Kecamatan	Dari Ibukota Kabupaten
1.	Tadokkong	38,70	1	37
2.	Betteng	57,76	5	41
3.	Binanga Karaeng	24,12	4	42
4.	Rajang	45,07	13	42
5.	Letta	17,12	42	67
6.	Ulu Saddang	130,64	21	64
7.	Suppirang	13,59	60	96
8.	Basseang	103,31	54	91
9.	Kariango	21,89	43	79
10.	Benteng Paremba	40,00	14	48
11.	Pakeng	41,57	9	41
12.	Lembang Mesakada	135,00	34	71
13.	Sali Sali	53,00	24	61
14.	Sabbangparu	11,32	6	39
Total		733,09		

Sumber : Profil Kecamatan Lembang Dalam Angka Tahun 2010

Dari tabel di atas luas wilayah menurut desa di Kecamatan Lembang sangatlah beragam. Desa Lembang Mesakada merupakan desa yang terluas dari desa yang lain yang ada di Kecamatan Lembang yaitu dengan luas wilayah 135,00 km<sup>2</sup>, sementara Desa Sabbang Paru adalah desa yang

paling kecil dengan luas wilayahnya di Kecamatan Lembang yaitu dengan luas wilayah 11,32 km<sup>2</sup>. Kecamatan Lembang di pengaruhi oleh 2 musim pada satu periode yang sama yaitu musim hujan dan musim kemarau, serta di pengaruhi oleh musim sektor barat dan lebih dikenal dengan sektor peralihan. Di mana puncak hujan hujan jatuh pada bulan April dan Oktober. Berdasarkan data curah hujan termasuk tipe iklim A dan B (daerah basah) suhu rata-rata normal 270<sup>0</sup> C dengan kelembaban udara kurang lebih 80% sampai 85%.

Jenis tanah di Kecamatan Lembang terdiri dari beberapa jenis tanah, diantaranya tanah alluvial gromosol, regesal brown forest dan podsolik. Jenis tanah yang menempati ruang terbesar di Kecamatan Lembang menyusul tanah regosol dan tanah gromosol.

### 3.1. 2 Keadaan Penduduk

Kecamatan Lembang yang mempunyai luas wilayah 733,09 km<sup>2</sup>, mempunyai jumlah penduduk 38.761 jiwa dan jumlah kepala keluarga 8.274 kepala keluarga yang tersebar pada 14 Kelurahan/ Desa. Desa yang terluas adalah Desa Lembang Mesakada dengan luas wilayah 135,00 km<sup>2</sup>, sedangkan desa yang paling kecil wilayahnya adalah Desa Sabbang Paru. Sementara desa yang paling padat penduduknya adalah Desa Sabbang Paru dengan jumlah penduduk 533 jiwa/11,32 km<sup>2</sup>, sedangkan yang paling jarang

penduduknya adalah Desa Basseng dengan jumlah penduduk 266 jiwa/103,31 km<sup>2</sup>.

Pembagian penduduk menurut desa, jenis kelamin dan banyaknya kepala keluarga di Kecamatan Lembang dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2

Pembagian Penduduk Menurut Kelurahan/Desa, Jenis Kelamin, dan Kepala Keluarga di Kecamatan Lembang Tahun 2010

No	Keluraha/Desa	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	KK
1.	Tadokkong	2363	2603	4966	1060
2.	Betteng	1343	1335	2678	543
3.	Binanga Karaeng	2119	2382	4501	940
4.	Rajang	2010	2084	4094	864
5.	Letta	427	429	856	190
6.	Ulu Sadding	1712	1702	3414	787
7.	Suppirang	1046	958	2004	479
8.	Basseang	743	675	1418	266
9.	Kariango	579	675	1254	292
10.	Benteng Paremba	1385	1362	2747	558
11.	Pakeng	1148	1268	2416	502
12.	Lembang Mesakada	2115	2052	4167	907
13.	Sali Sali	844	845	1689	353
14.	Sabbangparu	1231	1326	2557	533
	Total	19065	19696	38761	8274

Sumber : Profil Kecamatan Lembang Dalam Angka Tahun 2010

Untuk mendukung tercapainya kesejahteraan keluarga, harus didukung oleh mata pencaharian keluarga yang baik dan tangguh, dalam artian bahwa penghasilan keluarga dapat menjamin kesejahteraan keluarga itu sendiri. Mata pencaharian masyarakat Kecamatan Lembang sebagian besar adalah bertani, berkebun, nelayan, pedagang, wiraswasta, PNS, polisi, ABRI dan lain-lain. Namun sebagian besar para PNS yang ada juga melakukan pekerjaan sampingan yaitu bertani dan berkebun. Hal ini disebabkan mereka mempunyai lahan untuk bertani dan kebun untuk mereka kelolah.

### 3.1.3 Kondisi Sosial dan Budaya

Kehidupan masyarakat Kecamatan Lembang ini didasarkan pada prinsip rasa persaudaraan tinggi yang ditandai dengan ikatan kekeluargaan yang erat dan persatuan yang kuat. Masyarakatnya memiliki unsur gotong royong yang masih terjaga hingga saat ini. Hal ini dapat dimengerti karena penduduknya saling mengenal betul satu sama lain seolah-olah mereka mengenal dirinya sendiri. Walaupun terdapat perbedaan dari segi agama, ekonomi dan pendidikan. Penduduk di Kecamatan Lembang mayoritas memeluk agama islam dengan jumlah sebanyak 32.291 jiwa, agama katolik sekitar 4.544 jiwa, protestan sekitar 1.688 jiwa, dan lainnya 238 jiwa. Untuk lebih rinci dapat di lihat pada tabel 3.3 sebagai berikut:

Tabel 3.3

Banyaknya Penduduk Menurut Agama Tiap Kelurahan/Desa di Kecamatan  
Lembang Tahun 2010

No	Kelurahan/Desa	Agama					Jumlah
		Islam	Katolik	Protestan	Hindu/ Budha	Lainnya	
1.	Tadokkong	4913	29	28	-	-	4970
2.	Betteng	2678	-	-	-	-	2678
3.	Binanga Karaeng	4447	54	-	-	-	4501
4.	Rajang	4094	-	-	-	-	4094
5.	Letta	853	-	-	-	-	853
6.	Ulu Saddang	3402	12	-	-	-	3414
7.	Suppirang	239	1608	157	-	-	2004
8.	Basseang	1418	-	-	-	-	1418
9.	Kariango	1253	-	-	-	-	1253
10.	Benteng Paremba	2520	227	-	-	-	2747
11.	Pakeng	2416	-	-	-	-	2416
12.	Lembang Mesakada	718	2395	816	-	238	4167
13.	Sali Sali	800	202	687	-	-	1689
14.	Sabbangparu	2540	17	-	-	-	2557
		32291	4544	1688	-	238	38761

Sumber : Profil Kecamatan Lembang Dalam Angka Tahun 2010

#### 3.1.4 Kondisi Pendidikan

Salah satu faktor yang paling utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah dalam melalui sektor pendidikan, yaitu peningkatan mutu masyarakat dalam membantu dan menguasai pengetahuan dan teknologi. Hal tersebut diupayakan melalui peningkatan mutu pendidikan itu sendiri dan membuka seluas-luasnya kesempatan bagi peserta didik di setiap jenjang pendidikan. Serta bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melanjutkan sekolah hingga perguruan tinggi.

Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan formal yang mulai dari tingkat Taman Kanak-kanak sampai tingkat perguruan tinggi masih dalam kondisi memprihatinkan, karena sarana dan prasarana pendidikan untuk semua jenjang pendidikan baru beberapa saja yang memadai. Ditambah dengan akses menuju tempat sekolah juga cukup jauh dan memiliki hambatan.

Adapaun jumlah sarana pendidikan yang ada di Kecamatan Lembang adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4

Jumlah Sarana dan Prasarana Sekolah yang Ada di Kecamatan Lembang  
Tahun 2010

No	Tingkat Pendidikan	Negeri	Swasta	Jumlah
1.	TK	9	-	9
2.	SD	44	4	48
3.	SMP	5	1	6
4.	SMA	1	-	1
5.	Perguruan Tinggi	-	-	-
	Total	59	5	64

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pinrang

Berdasarkan data dari tabel 3.4 maka, dari jumlah sekolah yang ada di Kecamatan Lembang, hal tersebut dapat dikatakan bahwa jumlah sekolah tersebut dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang pendidikan di Kecamatan Lembang.

Sedangkan jumlah siswa berdasarkan tingkatan pendidikan yang ada di Kecamatan Lembang dapat kita lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.5

Jumlah Siswa/Peserta Didik di Kecamatan Lembang Tahun 2010

No	Tingkat Pendidikan	Negeri	Swasta	Jumlah
1.	TK	340	-	340
2.	SD	6962	404	7366
3.	SMP	1535	75	1610
4.	SMA	660	-	660
5.	Perguruan Tinggi	-	-	-
	Total	9497	479	9976

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pinrang

Dari data di atas dapat dilihat bahwa jumlah peserta didik pada lembaga pendidikan di tingkat SD cukup maksimal, namun di tingkat SMP dan SMA jumlah dari peserta didik semakin berkurang hal ini menjadi bukti bahwa tingkat kesadaran masyarakat masih kurang dalam melanjutkan sekolah sampai pada tingkat pendidikan perguruan tinggi.

## 3.2 Gambaran Umum Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pinrang

### 3.2.1. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pinrang

Berdasarkan Peraturan Bupati Pinrang Nomor 11 tahun 2008 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 19 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang pada Bab IV (empat) Bagian Pertama Pasal 5 menyatakan bahwa: Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang menjadi tanggung jawabnya dan kewenangan lain yang diserahkan oleh Bupati kepadanya.

Selanjutnya pada Pasal 6 dijelaskan bahwa: Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dinas pendidikan, pemuda dan olahraga mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan, Pemuda dan Olahraga berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya;
- d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, dan perlengkapan;
- e. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 3.2.2. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pinrang

Berdasarkan Peraturan Bupati Pinrang Nomor 11 tahun 2008 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 19 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang pada Bagian Kedua, Pasal 7 menjelaskan tentang Susunan dan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebagai berikut:

- (1) Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas
  - b. Sekretariat
    - 1. Sub Bagian Perencanaan ;

2. Sub Bagian Keuangan
3. Sub Bagian Umum
- c. Bidang Kurikulum
  1. Seksi Kurikulum Dasar
  2. Seksi Kurikulum Menengah
  3. Seksi Peningkatan mutu
- d. Bidang Pendidikan Dasar
  1. Seksi Manajemen Pendidikan
  2. Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
  3. Seksi Sarana dan Prasarana
- e. Bidang Pendidikan Menengah
  1. Seksi Manajemen Pendidikan
  2. Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
  3. Seksi Sarana dan Prasarana
- f. Bidang Pendidikan Luar Sekolah
  1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini
  2. Seksi Pendidikan Keaksaraan, Kesetaraan dan Agama
  3. Seksi Pendidikan Masyarakat dan Kelembagaan
- g. Bidang Pemuda dan Olahraga
  1. Seksi Pembinaan Kepemudaan
  2. Seksi Pembinaan Olahraga
  3. Seksi Pembinaan Kesiswaan dan Seni

h. Unit Pelaksanaan Teknis (UPT)

i. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

### 3.2.3. Program Pendidikan Tahun 2009-2014 di Kabupaten Pinrang

Pembangunan pendidikan di Kabupaten Pinrang

1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
2. Wajib belajar 9 tahun pada jenjang sekolah dasar dan jenjang sekolah menengah pertama;
3. Pendidikan menengah;
4. Pendidikan non formal;
5. Peningkatan mutu pendidik dan kependidikan;
6. Manajemen layanan pendidikan.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bab ini diuraikan hasil penelitian yang didapatkan penulis selama melakukan penelitian di Kabupaten Pinrang Kecamatan Lembang serta Dinas/Instansi yang terkait beserta pembahasannya. Bab ini menguraikan tentang Analisis Peranan Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat, kaitannya dengan pengentasan anak putus sekolah. Berdasarkan 5 kasus anak putus sekolah yang ditemukan penulis di Kecamatan Lembang.

#### 4.1. Kondisi Obyektif (Gambaran Umum) Studi Anak Putus Sekolah di Kecamatan Lembang

Kondisi anak putus sekolah yang terjadi di Kecamatan Lembang cukup memprihatinkan bagi setiap orang terutama bagi pemerintah daerah dan pengamat pendidikan. Menurut Sekretaris Camat Lembang Abd Patnan Sittara SE, bahwa:

"Untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera tentunya harus memenuhi prasyarat yaitu Sumber Daya Manusia (SDM) yang mapan dan berkualitas di bidang pengetahuan, keterampilan dan teknologi". (wawancara pukul 09.15, 12 Desember 2011)

Pendidikan formal membutuhkan proses belajar mengajar di bangku sekolah dan beberapa jenjang atau tingkat pendidikan mulai dari tingkat SD (Sekolah Dasar), SMP (Sekolah Menengah Pertama), SMA (Sekolah Menengah Atas) dan Perguruan Tinggi. Namun dalam proses pendidikan secara formal belum dapat terealisasikan secara maksimal disebabkan karena angka putus sekolah di Kecamatan Lembang mencapai angka 979 anak, dimana penyebab dari putus sekolah ini tentunya sangat beragam sesuai dengan kondisi kehidupan yang dialami oleh anak-anak yang putus sekolah. Berikut ini data perbandingan anak putus dan atau tidak sekolah dengan anak sekolah yang ada di Kecamatan Lembang:

Tabel 4.1

Perbandingan Anak Sekolah dan Anak Putus dan Atau Tidak Sekolah di Kecamatan Lembang

Tahun 2010

No	Tingkat Pendidikan	Usia (Tahun)	Jumlah		Persentase (%)	
			Anak Putus dan Atau Tidak Sekolah	Anak Sekolah	Anak Putus dan Atau Tidak Sekolah	Anak Sekolah
1	SD	6-11 / 7-12	166	7.366	2,2	97,8
2	SMP	11-14 / 12-15	372	1.610	18,8	81,2
3	SMA	14-17 / 15-18	441	660	40,1	59,9
	Jumlah		979	9.976	9,2	90,8

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pinrang



Berdasarkan tabel 4.1 angka anak putus sekolah dan atau tidak sekolah terjadi pada tingkatan SMA (Sekolah Menengah Atas) dengan persentase sebesar 40,1 % sedangkan anak sekolah sebesar 59,9 %. Kemudian pada tingkat SMP (Sekolah Menengah Pertama) anak putus dan atau tidak sekolah sebesar 18,8 % dan anak sekolah sebesar 81,2 %. Dan anak putus dan atau tidak sekolah pada tingkat SD (Sekolah Dasar) sebesar 2,2 % dan anak sekolah sebesar 97,8 %. Hal ini berarti semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin tinggi pula tingkat anak putus dan atau tidak sekolah. Anak tidak dan atau putus sekolah terjadi disebabkan karena beberapa faktor yang akan diuraikan pada pembahasan selanjutnya.

Tabel 4.2

Data Anak Tidak dan Atau Putus Sekolah Berdasarkan Jenis Kelamin di Kecamatan Lembang Tahun 2010

No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	SD	69	97	166
2	SMP	225	147	372
3	SMA	247	194	441
Total		541	438	979

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pinrang

Dari tabel 4.2 menunjukkan bahwa sebagian besar anak yang tidak dan atau putus sekolah di Kecamatan Lembang didominasi oleh anak laki-laki, kecuali di tingkat SD yang mendominasi adalah anak perempuan yang mencapai angka 97 anak perempuan dan 69 anak laki-laki. Berbeda dengan anak yang tidak dan atau putus sekolah di tingkat SMP yang didominasi oleh anak laki-laki dengan jumlah 225 anak, dan untuk perempuan berjumlah 147 anak. Sedangkan di tingkat SMA anak laki-laki mencapai angka 247 anak dan perempuan menacapai angka 194 anak.

Tabel 4.3

Anak Tidak dan Atau Putus Sekolah di Kecamatan Lembang Berdasarkan Status Pekerjaan Orang Tua Tahun 2010

No	Tingkat Pendidikan	Berdasarkan Status Pekerjaan Orang Tua							Jumlah	
		PNS	TNI/Polri	Pens PNS	Pens. TNI/Polri	Petani/Peternak	Pedagang	Nelayan		Tidak Bekerja
1	SD	0	0	0	0	32	47	35	52	166
2	SMP	5	3	2	2	77	63	95	125	372
3	SMA	19	5	7	3	103	87	85	132	441
	Jumlah	24	8	9	5	212	197	215	309	979

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pinrang

Penyebab anak tidak dan atau putus sekolah dapat dilihat dari kondisi ekonomi orang tua/keluarga serta perhatian orang tua terhadap anaknya menjadi pemicu anak untuk melanjutkan sekolahnya. Berdasarkan tabel 4.3, di tingkat SD anak yang tidak dan atau putus sekolah disebabkan

karena orang tuanya tidak memiliki pekerjaan mencapai angka 52 anak, yang bekerja sebagai pedagang berjumlah 47 anak, yang bekerja sebagai nelayan berjumlah 35 anak, dan yang bekerja sebagai petani/peternak berjumlah 32 anak. Dan di tingkat SMP anak yang tidak dan atau putus sekolah yang orang tuanya tidak bekerja berjumlah 125 anak, yang bekerja sebagai nelayan berjumlah 95 anak, yang bekerja sebagai petani/peternak berjumlah 77 anak, yang bekerja sebagai pedagang berjumlah 63 anak, yang PNS berjumlah 5 anak, TNI/Polri berjumlah 3 anak, Pensiunan PNS berjumlah 2 anak, dan pensiunan TNI/ Polri berjumlah 2 anak. Dan untuk tingkat SMA anak yang tidak dan atau putus sekolah yang orang tuanya tidak bekerja berjumlah 132 anak, yang bekerja sebagai petani/peternak berjumlah 103 anak, yang bekerja sebagai pedagang berjumlah 87 anak, yang bekerja sebagai nelayan berjumlah 85 anak, PNS berjumlah 19 anak, Pensiunan PNS berjumlah 7 anak, TNI/Polri berjumlah 5 anak, dan pensiunan TNI/Polri berjumlah 3 anak.

Tabel 4.4

Anak Tidak dan Atau Putus Sekolah di Kecamatan Lembang Berdasarkan Tempat Tinggal Anak Tahun 2010

No	Tingkat Pendidikan	Berdasarkan Tempat Tinggal				Jumlah
		Bersama Orang Tua	Nenek/Kakek	Anak Angkat (Numpang)	Panti/LSM	
1	SD	108	32	17	9	166
2	SMP	98	181	86	7	372
3	SMA	138	198	92	13	441
Jumlah		344	411	195	29	979

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pinrang

Berdasarkan tabel 4.4 menunjukkan bahwa anak yang tidak dan atau putus sekolah ternyata tidak semuanya tinggal bersama orang tua mereka, pada tingkat SD anak yang tidak dan atau putus sekolah, yang tinggal bersama orang tua mereka berjumlah 108 anak, tinggal dengan kakek/neneknya berjumlah 32 anak, tinggal menumpang dengan orang lain atau menjadi anak angkat berjumlah 17 anak, dan yang tinggal di panti asuhan/LSM berjumlah 9 anak. Dan di tingkat SMP anak yang tidak dan atau putus sekolah paling banyak yang tinggal dengan kakek/neneknya dengan jumlah 181 anak, yang tinggal bersama orang tua berjumlah 98 anak, yang menumpang atau menjadi anak angkat berjumlah 86 anak, dan yang tinggal di panti asuhan berjumlah 7 anak. Kemudian di tingkat SMA, anak yang tidak dan atau putus sekolah kebanyakan yang tinggal dengan nenek/kakeknya dengan jumlah 198 anak, yang tinggal dengan orang tua berjumlah 138 anak, yang menumpang atau menjadi anak angkat berjumlah 92 anak, dan yang tinggal di panti asuhan berjumlah 13 anak. Hal ini menunjukkan bahwa perhatian dari orang tua/wali, keluarga, dan orang-orang terdekat menjadi pemicu anak untuk bersekolah.

Tabel 4.5

Kondisi Anak Tidak dan Atau Putus Sekolah di Kecamatan Lembang  
Berdasarkan History Pendidikannya di Tahun 2010

No	Tingkat Pendidikan	History Sekolah		Jumlah
		Pernah	Tidak Pernah	
1	SD	127	39	166
2	SMP	233	139	372
3	SMA	285	156	441
Jumlah		645	334	979

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pinrang

Pada tabel 4.5 menggambarkan tentang kondisi history pendidikannya. History pendidikan yang dimaksud adalah apakah anak pernah mengenyam pendidikan atau bersekolah baik di tingkat SD (Sekolah Dasar), SMP (Sekolah Menengah Pertama), dan SMA (Sekolah Menengah Atas) atau tidak pernah sama sekali. Berdasarkan tabel 4.5 pada tingkat SD anak yang pernah sekolah berjumlah 127 anak, sedangkan yang tidak pernah sekolah di SD berjumlah 39 anak. Dan di tingkat SMP anak yang pernah sekolah berjumlah 233 anak dan yang tidak pernah sekolah di SMP berjumlah 139 anak. Sedangkan di tingkat SMA anak yang pernah sekolah berjumlah 285 anak dan yang tidak pernah sekolah di SMA berjumlah 156 anak.

#### 4.2. Faktor-faktor yang Menyebabkan Anak Putus Sekolah



Kasus anak putus sekolah tentunya tidak akan terlepas dari beberapa hal yang mempengaruhi anak sekolah sehingga tidak dapat menyelesaikan sekolah, wajar saja terjadi karena anak dihadapkan oleh beberapa kendala, baik yang datang dari diri sendiri maupun yang datang dari luar diri anak yaitu lingkungan. Berikut ini penulis akan memaparkan 5 (lima) kasus mengenai anak putus dan atau tidak sekolah yang terjadi di Kecamatan Lembang:

**Pertama**, kasus yang terjadi di Desa Binanga Karaeng, dimana anak-anak pada usia sekolah mulai kelas 1-6 SD sudah terbiasa dengan kultur nelayan dimana pada jam 8-10 pagi, manakala para nelayan sandar kembali dari melaut sering kali dikerumuni oleh anak-anak yang ikut membantu mendorong sampan dan perahu untuk sandar di daratan ditepi pantai. Salah satunya anak dari pasangan Puang Bojo dan mama Suri yang mempunyai 3 orang anak yang masih bersekolah di SD dan satunya di SMP, yang seringkali menolong para nelayan ini, sehingga mendapatkan upah dari para nelayan berupa satu hingga lima ekor ikan setiap harinya yang kalau mereka kumpulkan dapat mencapai harga antara lima hingga lima puluh ribu rupiah dalam seharinya.

Dengan uang ini anaknya dapat berbelanja apa saja yang dia senangi tanpa meminta uang jajan dari orang tuanya. Keadaan ini diketahui oleh para orang tua dan mereka merasa tidak terbebani karena anak-anak

mereka dapat mencari uang jajan untuk dirinya sendiri. Selain itu pemahaman Puang Bojo dan Mama Suri mengenai pentingnya sekolah juga minim dikarenakan mereka hanya lulusan SD (Sekolah Dasar), jadi dia tidak menghiraukan apa yang dialami oleh anak mereka terutama bagi perkembangan pendidikan anak-anaknya. (wawancara pukul 09.18, tanggal 15 Desember 2011).

Ada hal menarik dari kebiasaan ini, dimana anak-anak terbiasa mandiri untuk memenuhi kebutuhan pribadi mereka untuk uang jajan dan kebutuhan lainnya. Anak-anak juga sudah mengenal uang dan mata uang berikut manfaatnya untuk keperluan jual beli. Kegiatan ini juga terbilang mudah dan tidak memerlukan keahlian khusus dan terkadang lebih nampak seperti kegiatan meminta ikan kepada para nelayan kalau tidak disebut kegiatan mengemis. Walau demikian waktu antara jam 8-10 pagi adalah waktu dimana anak-anak ini seharusnya berada disekolah untuk aktivitas belajar mengajar dan pada waktu-waktu seperti inilah anak-anak dengan latar belakang keluarga yang kurang mampu sering membolos untuk membantu para nelayan ini.

Menurut Kepala sekolah dan Guru di SD Inpres Pajalele serta masyarakat Dusun Pajalele bahwa kegiatan membantu para nelayan oleh anak-anak pada jam sekolah inilah yang telah memicu anak-anak di Dusun Pajalele, Desa Binanga Karaeng ini untuk membolos, absen tidak masuk sekolah dan bahkan meninggalkan sekolah sama sekali.

Berdasarkan kasus pertama terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab anak putus sekolah dan atau tidak sekolah yang terjadi di tingkat SD yakni:

#### **Latar Belakang Pendidikan Orang Tua**

Pendidikan orang tua yang hanya tamat sekolah dasar apalagi tidak tamat sekolah dasar, hal ini sangat berpengaruh terhadap cara berpikir orang tua untuk menyekolahkan anaknya, dan terhadap cara berpikir orang tua untuk menyekolahkan anaknya, dan cara pandangan orang tua tentu tidak sejauh dan seluas orang tua yang berpendidikan lebih tinggi. Seperti yang terjadi pada Puang Bojo, karena latar belakang pendidikannya hanya sampai pada tingkat SD maka dia pun tidak menghiraukan pendidikan anaknya serta kegiatan mereka.

Orang tua yang hanya tamat sekolah dasar atau tidak tamat cenderung kepada hal-hal tradisional dan kurang menghargai arti pentingnya pendidikan. Mereka menyekolahkan anaknya hanya sebatas bisa membaca dan menulis saja, karena mereka beranggapan sekolahnya seseorang kepada jenjang yang lebih tinggi pada akhir tujuan adalah untuk menjadi pegawai negeri dan mereka beranggapan sekolah hanya membuang waktu, tenaga dan biaya, mereka juga beranggapan terhadap anak lebih baik ditujukan kepada hal-hal yang nyata yaitu membantu orang tua dalam berusaha seperti menjadi nelayan hingga menghasilkan uang lebih bermanfaat dan nyata bagi mereka, dibandingkan harus sekolah yang

mengeluarkan biaya dan cenderung membuang waktu. Lagi pula sekolah harus melalui seleksi dan ujian yang di tempuh dengan waktu yang panjang dan amat melelahkan.

Latar belakang pendidikan orang tua yang rendah merupakan suatu hal yang mempengaruhi anak sehingga menyebabkan anak menjadi putus sekolah dalam usia sekolah. Karena pemahaman orang tua mengenai pendidikan dan pentingnya bersekolah masih kurang.

#### **Kondisi Lingkungan Tempat Tinggal Anak**

Adanya suasana lingkungan masyarakat yang kurang baik, akan mengganggu anak dalam belajar dan secara langsung akan mempengaruhi prestasi belajar yang diperoleh di sekolah. Bisa juga disebabkan suasana yang ribut tapi menyenangkan hati anak, anak akan terpengaruh dan ikut serta di dalamnya dan dia lupa bahwa dirinya seorang pelajar. Seperti yang terjadi dengan anak-anak Puang Bojo yang terkadang lupa akan dirinya yang berstatus sebagai pelajar, mereka seringkali lupa waktu karena membantu para nelayan.

Perilaku masyarakat pedesaan dalam menyekolahkan anaknya lebih banyak dipengaruhi faktor lingkungan seperti yang terjadi dengan keluarga Puang Bojo. Dia beranggapan bahwa tanpa bersekolah pun anak-anak mereka dapat hidup layak seperti anak lainnya yang bersekolah. Oleh karena di desa jumlah anak yang tidak bersekolah lebih banyak dan mereka dapat hidup layak maka kondisi seperti itu dijadikan landasan dalam menentukan

masa depan anaknya. Seorang pelajar tidak pantas melakukan hal-hal yang negatif, karena akan merugikan. Tugas pelajar adalah belajar, agar suatu hari nanti menjadi orang yang bermanfaat bagi orang banyak.

Pemerintah saat ini tengah berupaya mengentaskan anak putus sekolah yang terjadi pada usia dini melalui program wajib belajar 9 tahun, serta memberikan bantuan berupa dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) kepada setiap siswa. Namun hal ini belum maksimal karena faktor tingkat pendidikan orang tua siswa serta bagaimana perhatian orang tua siswa terhadap perkembangan pendidikan sang anak, selain itu lingkungan yang memberikan dampak negatif bagi anak sekolah sehingga mengganggu proses belajar di sekolah menjadi faktor terjadinya anak putus sekolah dan atau tidak sekolah di tingkat SD (Sekolah Dasar).

**Kedua,** kasus anak putus sekolah yang terjadi di Desa Ulu Saadang, Kecamatan Lembang ini terdapat beberapa keluarga yang memiliki anak putus sekolah. Salah satunya yang terjadi pada keluarga Puang Alling yang memiliki anak 7 orang (4 laki-laki dan 3 perempuan). Puang Alling yang bekerja sebagai petani dan berkebun ini tentunya memiliki penghasilan yang tidak menetap, sehingga anak-anaknya cuma bisa menyelesaikan sekolahnya di tingkat SD (Sekolah Dasar) dan SMP (Sekolah Menengah Pertama). Saat diwawancarai pada pukul 13.17 tanggal 10 Desember 2012, Puang Alling mengaku bahwa: anak-anaknya terpaksa putus sekolah karena dia kurang mempunyai dalam hal biaya. Walau pemerintah telah memberikan

berbagai bentuk bantuan seperti dana BOS, beasiswa bagi keluarga miskin para orang tua mengeluh akan tingginya pembiayaan yang terkait dengan aspek biaya yang harus dikeluarkan untuk menyekolahkan anak-anak mereka seperti biaya untuk kebutuhan pribadi anak yang bersekolah seperti baju seragam, sepatu, tas, buku, alat tulis dan tambahan uang jajan pada saat anak-anaknya bersekolah. Selain dari masalah biaya sarana sekolah tingkat lanjutan misalnya SMP (Sekolah Menengah Pertama) dan SMA (Sekolah Menengah Atas) jaraknya sangat jauh dari tempat tinggal mereka yakni sekitar  $\pm$  21 km, selain itu akses jalan yang berbahaya juga menjadi kekhawatiran tersendiri buat Puang Alling untuk menyekolahkan anak-anaknya. Sementara itu setelah tamat dari sekolah, anak-anaknya belum tentu bisa menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) atau mendapatkan pekerjaan yang tetap.

Maka dari itu anak-anaknya terutama yang laki-laki, yang merasa mampu untuk bekerja lebih cenderung untuk pergi merantau atau membantu orang tuanya bertani dan berkebun untuk mendapatkan uang daripada melanjutkan sekolahnya. Hal ini tentunya dapat meringankan beban orang tuanya serta dapat menambah penghasilan dan mengatasi kesulitan biaya hidup. Sedangkan anak perempuannya bertugas untuk menjaga rumah, membersihkan dan memasak bahkan menikah di usia dini.

**Ketiga**, kasus yang terjadi di Desa Rajang, tepatnya di SMP 3 Rajang, berdasarkan wawancara dengan Kepala Sekolah SMP 3 Rajang yaitu Bapak Muh. Yunus S.Pd (wawancara pukul 11.30, tanggal 17 Desember 2011), penulis mengetahui bahwa ada 2 (dua) orang anak yang DO (Drop Out)/dikeluarkan dari sekolah yaitu anak kelas VIII/a (Delapan/a) dan kelas IX/b (Sembilan/b). Anak yang DO (Drop Out) pada kelas IX/b (Sembilan/b) adalah dikarenakan oleh kondisi keluarganya dimana bapak dan ibunya bercerai dan anak tinggal dengan neneknya. Dengan kondisi keluarga yang berantakan, anak ini menjadi malu bertemu dengan teman-temannya sehingga dia tidak mau lagi ke sekolah. Siswa yang DO satunya lagi adalah anak dengan latar belakang keluarga miskin. Anak ini tidak memiliki baju seragam dan sepatu untuk sekolah, karena malu kemudian tidak mau masuk sekolah. Setelah dijenguk oleh guru dan mendapat bantuan sekolah untuk baju seragam dan sepatu anak ini tetap tidak mau sekolah karena orang tuanya sering tidak ada dirumah. Orang tua anak ini bekerja sebagai petani sehingga orang tuanya seringkali ke sawah. Ibu dari anak ini jualan di pasar dan karena kondisi seperti ini anak ini harus membantu ibunya menjaga adik-adiknya dirumah.

Berdasarkan kasus kedua dan ketiga terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya anak putus dan atau tidak sekolah yang terjadi pada tingkat SMP (Sekolah Menengah Pertama) yakni:

## Lemahnya Ekonomi Keluarga

Berdasarkan kasus kedua yang dialami oleh keluarga Puang Alling dan kasus ketiga yang menimpa siswa SMP 3 Rajang kelas IX/b (sembilan/b), yang terjadi karena lemahnya ekonomi keluarga mengakibatkan anak tidak dan atau putus sekolah. Kurangnya pendapatan keluarga menyebabkan orang tua terpaksa bekerja keras mencukupi kebutuhan pokok sehari-hari, sehingga pendidikan anak kurang diperhatikan dengan baik dan bahkan membantu orang tua dalam mencukupi keperluan pokok untuk makan sehari-hari misalnya anak membantu orang tua ke sawah atau di kebun, karena dianggap meringankan beban orang tua anak diajak ikut orang tua ke tempat kerja yang jauh dan meninggalkan sekolah dalam waktu yang cukup lama.

Selain itu menjadi buruh tanpa tujuan untuk membantu pekerjaan orang tua, setelah merasa enaknyanya membelanjakan uang hasil usaha sendiri akhirnya anak tidak terasa sekolahnya ditinggalkan begitu saja, anak perempuan di suruh mengasuh adiknya di waktu ibu sibuk bekerja.

Keluarga Puang Alling seringkali timbul berbagai masalah yang berkaitan dengan pembiayaan hidup anak, sehingga anak sering dilibatkan untuk membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga seperti bekerja di sawah dan di kebun, sehingga merasa terbebani dengan masalah ekonomi ini sehingga mengganggu kegiatan belajar dan kesulitan mengikuti pelajaran.

Hal inilah yang menjadi alasan bagi anak Puang Alling untuk tidak melanjutkan sekolahnya ke tingkat SMP.

Hal ini tidak jauh beda dengan kondisi siswa kelas IX/b (Sembilan/b) SMP 3 Rajang yang putus sekolah di tingkat SMP, karena pendapatan keluarga yang serba kekurangan juga menyebabkan kurangnya perhatian orang tua terhadap anak kerap kali setiap harinya hanya memikirkan bagaimana caranya agar keperluan keluarga bisa terpenuhi, apalagi kalau harus meninggalkan keluarga untuk berusaha menempuh waktu berbulan-bulan bahkan kalau sampai tahunan, hal ini tentu pendidikan anak menjadi terabaikan.

### **Kondisi Lingkungan Tempat Tinggal Anak**

Lingkungan tempat tinggal anak adalah salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya kegiatan dan proses belajar/pendidikan. Oleh sebab itu seyogyanya lingkungan tempat tinggal anak atau lingkungan masyarakat ini dapat berperan dan ikut serta di dalam membina kepribadian anak-anak kearah yang lebih positif.

Kondisi lingkungan yang baik, aman serta nyaman tentunya berpengaruh terhadap proses belajar mengajar. Kondisi lingkungan yang baik ditandai dengan adanya akses jalan yang baik. Berdasarkan pengamatan penulis di Kecamatan Lembang akses jalan sangat memprihatinkan karena

banyaknya jalanan yang rusak dan terjal terutama di daerah pegunungan, hal ini tentunya mempengaruhi minat anak-anak untuk bersekolah seperti yang terjadi pada anak Puang Alling di Desa Ulu Saddang. Akses jalan yang jauh, berbahaya dan tidak aman menjadi kekhawatiran sendiri bagi Puang Alling untuk menyekolahkan anak-anaknya ke tingkat SMP dan SMA.

Hal ini sesuai dengan pendapat Kepala Sekolah SMP 5 Kecamatan Lembang Bapak Nasrullah S.Pd bahwa:

" Sulitnya akses jalan menuju sekolah membuat para tenaga pengajar memilih mangkir dari wilayah pegunungan tersebut, sehingga siswa tidak menerima pengajaran secara maksimal. Hal ini tentunya menjadikan para siswa malas untuk pergi sekolah dan memilih untuk membantu orang tua mereka daripada ke sekolah yang hanya membuang tenaga dan waktu saja. Selain akses jalan menuju sekolah, jaminan keamanan dari ulah para perampok juga menjadikan para tenaga pengajar dan siswa malas dan takut untuk ke sekolah". (wawancara pukul 09.47, 21 Desember 2011).

Kondisi lingkungan yang baik tentunya dapat memberikan dampak yang positif bagi proses belajar mengajar tanpa ada hambatan. Sehingga dalam proses ini para tenaga pengajar dapat memberikan dorongan dan membina anak didik ke arah yang lebih positif dan bermanfaat, sehingga anak didik bisa terpengaruh dan memiliki motivasi untuk mengikuti proses pendidikan/belajar dengan lancar dan baik. Serta bisa memberikan motivasi untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi.

### ➤ **Kurangnya Minat Anak Untuk Bersekolah**

Kurangnya minat anak untuk bersekolah atau melanjutkan sekolah hingga perguruan tinggi seperti kasus ketiga yang dialami oleh siswa SMP 3 Rajang, kelas VIII/a (delapan/a) yang tidak berminat untuk bersekolah karena malu dengan teman-temannya atas kondisi kehidupannya dan siswa kelas IX/b (Sembilan/b) cenderung untuk membantu orang tuanya meringankan beban keluarga daripada pergi sekolah, sehingga minat untuk bersekolah menjadi kurang.

Anak usia wajib belajar semestinya menggebu-gebu ingin menuntut ilmu pengetahuan namun karena terbebani oleh kondisi kehidupan ekonomi keluarga yang kurang baik terhadap perkembangan pendidikan anak, sehingga minat anak untuk bersekolah kurang mendapat perhatian sebagaimana mestinya, adapun yang menyebabkan anak kurang berminat untuk bersekolah adalah: anak kurang mendapat perhatian dari orang tua terutama tentang pendidikannya, juga karena kurangnya orang-orang terpelajar sehingga yang mempengaruhi anak kebanyakan adalah orang yang tidak sekolah sehingga minat anak untuk sekolah sangat kurang.

Anak seusia wajib belajar sudah mengenal bahkan sudah mampu untuk mencari uang terutama untuk keperluannya sendiri seperti jajan dan lain-lain, hal ini tentu akan mempengaruhi terhadap cara dan sikap anak dalam bertindak dan berbuat. Pekerjaan yang dilakukan oleh anak-anak

untuk mendapatkan uang mengakibatkan sang anak tidak mengikuti proses belajarn mengarjar di sekolah.

**Keempat,** kasus yang dialami oleh anak seorang PNS bernama, Asrina Ningsih usia 16 tahun yang berdomisili di Kelurahan Tadokkong, dimana dia harus berhenti sekolah di jenjang SMA (Sekolah Menengah Atas) diakibatkan pengaruh lingkungan yang negatif. Asrina Ningsih berhenti sekolah karena hamil diluar nikah sehingga dia merasa malu untuk ke sekolah.

Selain kondisi yang dialami oleh Asrina Ningsih yang putus sekolah akibat pergaulan yang negatif, hal ini juga dialami oleh Rendy yang putus sekolah di jenjang SMA akibat pengaruh dari teman-temannya yang seringkali mengajaknya untuk minum minuman keras hingga dia lupa untuk pergi ke sekolah. Hingga akhirnya pihak sekolah memutuskan untuk mengeluarkannya dari sekolah.

**Kelima,** kasus yang terjadi pada Ansar (anak kelima dari 7 bersaudara) yang tinggal di Kelurahan Tadokkong, ini tidak melanjutkan pendidikannya hingga di perguruan tinggi, sedangkan kondisi ekonomi orang tuanya mencukupi untuk biaya kuliahnya. Menurut informan pada saat diwawancarai:

"Saya lebih memilih untuk bekerja karena menurut saya kuliah membutuhkan waktu minimal 4 tahun dan setelah sarjana, saya belum tentu menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) atau mendapatkan pekerjaan yang jelas. Dan untuk kuliah pun pastinya membutuhkan biaya yang sangat banyak. Sedangkan jika saya bekerja atau pergi

merantau tentunya saya lebih cepat mendapatkan uang dan tidak membuang-buang waktu". (wawancara pukul 14.25, 23 November 2011).

Pola pikir seperti inilah yang menjadi salah satu faktor bagi anak-anak untuk tidak melanjutkan sekolahnya hingga perguruan tinggi. Anak-anak yang tidak dan atau putus sekolah di tingkat SMA merasa cukup dengan pengetahuan yang didapatkan di tingkat SMA. Dan tidak melanjutkan kemampuan dan pengetahuan mereka hingga perguruan tinggi.

Berdasarkan kasus keempat dan kelima terdapat beberapa faktor yang menyebabkan anak putus dan atau tidak sekolah yang terjadi pada tingkat SMA (Sekolah Menengah Atas) antara lain:

➤ **Teman Sepergaulan**

Berdasarkan kasus keempat yang terjadi dengan siswa SMA N 1 Lembang akibat dari pergaulan yang negatif, Asrina Ningsih dan Rendy mengalami DO (Drop Out)/dikeluarkan dari sekolah. Rendy yang berstatus seagai pelajar bergaul dengan orang-orang yang tidak sekolah seringkali bolos sekolah hanya untuk bersenang-senang dengan teman-temannya seperti mabuk-mabukan. Sedangkan Asrina Ningsih yang dipengaruhi hal-hal negatif menjadikan dia terjerumus ke seks bebas hingga menciptakan aib bagi dirinya sendiri dan sekitarnya.

Bergaul dan berteman dengan orang yang berpendidikan dan berilmu pengetahuan yang lebih tinggi dari kita, akan mendatangkan manfaat kepada kita khususnya, dan akan membantu dan memotivasi kita dalam belajar

menuntut ilmu. Bila kita menemui kesulitan akan mudah bertanya/minta bimbingan kepada mereka yang lebih tahu.

Selain manfaat diatas, bergaul dengan orang yang berpengetahuan juga mendatangkan ketentraman, karena diri kita merasa dapat diterima oleh lingkungan dimana kita tinggal. Dengan demikian akan terjalin kerja sama bantu membantu antara sesamanya di dalam mensukseskan pembangunan, khususnya dalam bidang pendidikan.

#### ➤ **Pandangan Masyarakat Terhadap Pendidikan**

Pandangan Ansar terhadap pendidikan mewakili masyarakat yang menganggap pendidikan itu tidak berpengaruh terhadap keberhasilan seseorang. Pandangan masyarakat yang maju tentu berbeda dengan masyarakat yang keterbelakangan dan tradisional, masyarakat yang maju tentu pendidikan mereka maju pula, demikian pula anak-anak mereka akan menjadi bertambah maju pula pendidikannya dibanding dengan orang tua mereka. Pola pikir seperti inilah yang menyebabkan anak tidak melanjutkan sekolahnya hingga perguruan tinggi, karena masyarakat menganggap bahwa kuliah hanya membuang-buang waktu dan biaya saja. Dan pada akhirnya hal ini tidak menjamin seseorang dapat menjadi PNS atau mendapatkan pekerjaan tetap. Sedangkan pada hakikatnya kuliah menambah wawasan,

mengembangkan keterampilan, dan menambah teman bagi seseorang, dan lain-lain.

Masyarakat khususnya orang tua memiliki persepsi yang beragam tentang kondisi, kemampuan dan kemauan anak. Di desa Binanga Karaeng misalnya, orang tua menyatakan bahwa anaknya bersekolah atas kemauan orang tua. Temuan ini menunjukkan bahwa kemauan dan keinginan orang tua untuk menyekolahkan anaknya cukup tinggi. Meskipun mereka buta aksara, namun ada kesadaran bahwa pendidikan penting. Ini artinya mereka tidak mengharapkan anaknya mengikuti jejak mereka yang penuh dengan kebodohan, tidak bisa baca hitung, tidak bisa menulis.

Namun di balik fakta tersebut, juga tidak dipungkiri masih ada sebagian kecil masyarakat menganggap pendidikan itu kurang penting. Hal ini terjadi di daerah pelosok pegunungan di Desa Ulusaddang misalnya, sebagian masyarakat di sana menganggap bahwa pendidikan itu kurang penting. Alasannya adalah sekolah tidak menjamin orang bisa hidup mewah atau miskin, karena ada yang orang yang tidak sekolah tapi bisa hidup mewah karena mereka bekerja, sekolah hanyalah untuk orang Kaya, daerah ini banyak yang tamat SD saja, dan kalau anak sekolah jelas tidak dapat membantu orang tua mencari nafkah. Budaya seperti ini juga nampaknya masih mengakar di masyarakat. Belum adanya pemahaman yang komprehensif terhadap arti penting pendidikan mengakibatkan sebagian kecil masyarakat bersikap apatis terhadap pendidikan.

Maju mundurnya suatu masyarakat, bangsa dan negara juga ditentukan dengan maju mundurnya pendidikan yang dilaksanakan. Pada umumnya masyarakat yang terbelakang atau dengan kata lain masyarakat tradisional mereka kurang memahami arti pentingnya pendidikan, sehingga kebanyakan anak-anak mereka tidak sekolah dan kalau sekolah kebanyakan putus di tengah jalan.

Hal tersebut bisa terjadi karena mereka beranggapan sekolah sangat sulit, merasa tidak mampu, tidak berpengaruh akan perbaikan nasib mereka, buang waktu banyak, lebih baik bekerja sejak anak-anak akan membantu orang tua, tujuan sekolah sekedar bisa membaca dan menulis saja. Selain itu mereka beranggapan bahwa tujuan akhir dari sekolah adalah untuk menjadi pegawai negeri, hal ini tentu karena kurang memahami arti, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional.

Padahal fungsi pendidikan nasional bukan demikian, hal ini sebagaimana tergambar dan undang-undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 1989, Pasal 3. "pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan upaya tujuan nasional."

Demikian juga tujuan pendidikan nasional bukan seperti anggapan masyarakat tradisional, yang mana tujuan pendidikan nasional sebagaimana juga yang termuat dalam undang-undang RI nomor 20 tahun 2003, Pasal 4. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa bertujuan untuk terbentuknya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga yang demokratis serta bertanggung jawab.

Masyarakat yang tradisional kalau mereka memahami fungsi dan tujuan pendidikan nasional pada akhirnya akan menjadi masyarakat yang maju dan berkembang. Masyarakat yang terpencil atau masyarakat yang tradisional juga beranggapan bahwa sekolah itu pada dasarnya sedikit sekali yang sesuai dengan kehendak mereka, misalnya begitu tamat sekolah langsung mendapatkan pekerjaan, sekolah hendaknya tidak memerlukan biaya yang banyak, dan tidak memerlukan waktu yang terlalu lama.

Masyarakat hanya mendukung proses pendidikan itu jika sesuai dengan kehendak mereka, namun semua keinginan mereka harus terpenuhi tanpa harus berjuang dan berusaha secara maksimal. Masyarakat menginginkan sesuatu yang cepat tanpa melalui sebuah proses.

#### 4.3. Peranan Pemerintah Daerah Dalam Mengentaskan Anak Putus Sekolah di Kecamatan Lembang

Dari beberapa faktor yang menjadi penyebab anak putus sekolah yang telah diuraikan di atas, menjadikan jumlah anak putus sekolah di Kecamatan Lembang masih memprihatinkan bagi pemerintah daerah. Berdasarkan data yang diperoleh penulis di lapangan, jumlah anak putus sekolah di Kecamatan Lembang mencapai angka 979 anak. Hal inilah menjadi acuan bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kinerja kerja di bidang pendidikan.

Dalam melakukan pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam mengentaskan anak putus sekolah yang terjadi di Kecamatan Lembang tentunya membutuhkan peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang. Dimana, pemerintah daerah mengetahui apa yang menjadi kebutuhan masyarakatnya. Adapun peranan pemerintah daerah dalam mengentaskan anak putus sekolah antara lain: mengeluarkan kebijakan di bidang pendidikan, mengadakan sosialisasi kepada masyarakat, memberikan bantuan dana, optimalisasi pemberian beasiswa pendidikan bagi masyarakat miskin, dan program bantuan paket pendidikan .

a. **Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengentasan Anak Putus Sekolah**

Kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Pinrang di bidang pendidikan tentunya sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Pinrang yakni meningkatkan akses masyarakat, khususnya masyarakat kurang mampu terhadap layanan pendidikan yang berkualitas di semua jenjang pendidikan, utamanya SD, SLTP dan SLTA seiring dengan peningkatan mutu dan kesejahteraan guru.

Salah satu kebijakan pemerintah daerah dalam mengentaskan anak putus sekolah yang terjadi adalah gerakan penuntasan wajib belajar berbasis desa termasuk pemutakhiran datanya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis terhadap salah satu informan, bahwa kebijakan di bidang pendidikan yakni gerakan penuntasan wajib belajar berbasis desa telah diimplementasikan oleh pemerintah daerah. Menurut bapak. H. A. Sultani selaku Kepala bidang pendidikan dasar Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pinrang mengatakan bahwa:

"Upaya pemerintah dalam memberi yang terbaik untuk seluruh masyarakat terus dimaksimalkan. Pada sektor pendidikan, dalam beberapa tahun terakhir konsentrasi penambahan dan rehabilitasi gedung sekolah dipusatkan di wilayah-wilayah terpencil utamanya pegunungan, dimana jumlah anak putus sekolah yang sebelumnya tergolong tinggi. Selain itu, kami juga memaksimalkan pendataan anak usia sekolah yang putus sekolah,

sehingga lebih mudah bagi pihak kami untuk merangkul seluruh elemen masyarakat. Karena meski pemerintah telah berupaya meringankan kebutuhan masyarakat, jika tidak dibarengi tanggapan positif dari masyarakat, hasilnya juga akan nihil. Hal ini dikarenakan masih adanya pemikiran masyarakat yang menilai pendidikan berakhir di dapur atau di sawah". (wawancara pukul 09.15, 15 Desember 2011).

Salah satu indikator mutu pendidikan dilihat dari aspek peningkatan akses dan pemerataan pendidikan adalah jika jumlah anak yang tidak dan atau putus sekolah khususnya jenjang pendidikan dasar mencapai 0%. Jika indikator ini menjadi kesepakatan, maka mesti ada upaya gerakan secara kolektif masyarakat dengan pemerintah untuk memberantas atau memerangi anak tidak dan atau putus sekolah. Berdasarkan pengamatan penulis, nampaknya permasalahan pendidikan terkesan menjadi tanggung jawab sekolah/pemerintah (itupun pemerintah sampai di tingkat Kecamatan) sementara masyarakat dan pemerintahan khususnya tingkat desa tidak memiliki peran dalam menuntaskan anak tidak dan atau putus sekolah. Indikasi yang mudah dicermati adalah desa tidak memiliki data faktual dan terupdate terkait jumlah, sebaran, anak yang tidak dan atau putus sekolah. Demikian juga desa tidak memiliki mekanisme yang terstandar tentang bagaimana memetakan kondisi anak tidak dan atau putus sekolah mulai dari pendataan sampai penuntasannya..

Pemerintah desa dan segenap warganya mesti bertanggung jawab terhadap pembangunan bidang pendidikan khususnya meminimalkan anak putus dan atau tidak sekolah. Jika penuntasan anak putus dan atau tidak sekolah diaktualisasikan menjadi gerakan bersama berbasis desa, maka diharapkan semua elemen dalam masyarakat akan menjadikan anak yang tidak dan atau putus sekolah menjadi aib di desanya sehingga ada upaya menjadikannya sebagai musuh bersama.

#### **b. Sosialisasi Kepada Masyarakat**

Selain mengeluarkan kebijakan di bidang pendidikan pemerintah daerah juga perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat sebagai upaya pembinaan terhadap masyarakat. Pemberdayaan ini dilakukan dengan cara memberikan penjelasan mengenai pentingnya serta manfaat dari proses pendidikan/bersekolah kepada masyarakat melalui proses sosialisasi.

Banyaknya anak yang tidak dan putus sekolah karena perhatian orang tua yang kurang dan faktor budaya dapat di atas melalui pendekatan tertentu oleh pemerintah daerah. Kurangnya perhatian dapat disebabkan karena rendahnya kesadaran orang tua tentang arti penting pendidikan. Begitu juga dengan faktor budaya. Faktor budaya yang dimaksudkan adalah adanya pandangan yang kurang tepat pendidikan yaitu, pendidikan belum

tentu menjamin kehidupan yang lebih layak. Sebab, banyak anak-anak tidak memiliki latar pendidikan tetapi dapat hidup layak. Upaya mengatasi kondisi di atas, selain melakukan pembinaan maka pemerintah harus melakukan kampanye pendidikan berupa sosialisasi dan dialog tatap muka.

Selain itu, pemerintah daerah dapat mensosialisasikan kebijakan-kebijakan strategis terutama di bidang pemerataan dan perluasan akses, misalnya subsidi pendidikan gratis, penyaluran dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah), program wajib belajar 9 tahun dan 12 tahun. Melalui sosialisasi ini diharapkan dapat membangkitkan kesadaran orang tua dalam menyekolahkan anak-anaknya.

Sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah berupa pembinaan dan pemberian motivasi terhadap masyarakat untuk memberikan kesadaran mengenai pentingnya bersekolah dilakukan oleh pemerintah daerah di kantor camat Kecamatan Lembang. Adapun tata cara sosialisai tersebut dengan mengadakan pertemuan atau pelatihan mengenai pendidikan dengan setiap kepala Desa/Lurah dan tokoh masyarakat. Serta melakukan kunjungan atau peninjauan ke setiap desa secara merata hingga ke pelosok pegunungan.



c. **Pemberian Bantuan Dana**

Pemerintah Kabupaten Pinrang telah berupaya dalam mewujudkan peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Pinrang termasuk di Kecamatan Lembang. Salah satu indikator paling penting guna peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Pinrang yakni penganggaran untuk membantu proses peningkatan kualitas terutama disektor pendidikan. Dan diharapkan dapat membantu untuk mengurangi beban masyarakat dalam menghadapi masalah biaya pendidikan, sehingga dapat mengatasi anak putus sekolah yang terjadi di Kabupaten Pinrang terutama di Kecamatan Lembang. Untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan keterlibatan semua unsur dan elemen masyarakat yang ada.

Untuk tahun ini pemerintah mengalokasikan anggaran Dana BOS (Bantuan Operasional Pendidikan) yang cukup besar ke Kabupaten Pinrang, Sulsel, yakni mencapai 46 Miliar lebih atau meningkat Rp.4 Miliar dibanding tahun lalu. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pinrang H. A. Mappanyukki, mengatakan:

"Besarnya alokasi anggaran yang digelontorkan Pemerintah Pusat dan Daerah disektor pendidikan membuktikan keseriusan dan besarnya perhatian pemerintah dalam peningkatan mutu pendidikan didaerah ini. Besarnya alokasi anggaran yang digelontorkan Pemerintah Pusat dan Daerah disektor pendidikan membuktikan keseriusan dan besarnya perhatian pemerintah dalam peningkatan mutu pendidikan didaerah ini. Semua pihak yang bergelut didunia

pendidikan seyogyanya melakukan langkah efektif dan efisien serta mengedepankan transparansi dalam mengelolah anggaran tersebut, sekaligus memberi manfaat yang cukup besar dalam meningkatkan mutu pendidikan di daerah ini". (Kompasiana, 12 Januari 2012).

Program tersebut tentunya sangat sesuai dengan arah kebijakan sektor pendidikan yang mengarah kepada peningkatan mutu serta revitalisasi pendidikan, dan memprogramkan penyebaran guru atau tenaga pendidik secara merata kesemua wilayah khususnya dikawasan pegunungan dan daerah terpencil.

Secara umum pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga membuat arah kebijakan pendidikan tersebut untuk memberi semangat dan ruang lingkup yang cukup luas agar dapat mengembangkan dirinya , potensi serta keterampilan yang dimilikinya agar dapat hidup mandiri ditengah masyarakat atau dapat melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi tanpa dipungut biaya.

Anggaran dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan pendidikan di daerah ini jumlahnya sangat besar. Data di Dikpora Pinrang menyebutkan, sekolah dasar negeri sebesar Rp.19,5 Miliar, SD swasta sebesar Rp.270 juta. Sementara untuk Sekolah Menengah Pertama yang berstatus Negeri sebesar Rp. 9,5 Miliar dan Swasta sebesar Rp.341 juta. Dana tersebut dialokasikan kepada siswa SD negeri yang berjumlah 49.383 siswa sedangkan SD Swasta 682 siswa, dengan

kisaran persiswa sebesar 397 ribu untuk SD, dan untuk SMP sebesar 570 ribu persiswa pertahunnya.

Untuk Kecamatan Lembang sendiri memiliki SD Negeri sebanyak 44 dengan jumlah siswa sebanyak 6.962 siswa. Sedangkan SD Swasta sebanyak 4 sekolah dengan jumlah siswa sebanyak 404 siswa. Untuk Sekolah Menengah Pertama Negeri sebanyak 5 sekolah, jumlah ini sudah termasuk sekolah terbuka dan sekolah satu atap. Dengan jumlah siswa sebanyak 1.535 siswa. Sedangkan SMP Swasta sebanyak 1 sekolah dengan jumlah siswa 75 siswa. Sementara dana pendidikan Gratis sebesar Rp.9,2 Miliar dan dana sertifikasi sebesar Rp.32,6 Miliar.

Selain dari Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) pemerintah daerah juga memberikan bantuan bagi siswa miskin di setiap sekolah dan beasiswa bagi siswa yang berprestasi. Dengan adanya bantuan-bantuan dana yang diberikan oleh pemerintah daerah tentunya sangat bermanfaat bagi masyarakat dalam mengatasi masalah biaya pendidikan yang menurut mereka mahal.

Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) bersumber dari APBD yang ditransfer ke pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan ke sekolah yang berstatus negeri. Sedangkan untuk sekolah swasta, disalurkan melalui Dinas PPKAD dalam bentuk dana hibah. Adapun mekanisme penyaluran

dana BOS bersifat fluktuasi. Artinya, kadang mengalami kenaikan, bahkan bisa mengalami penurunan.

**d. Optimalisasi Pemberian Beasiswa Pendidikan Bagi Masyarakat Miskin**

Diantara faktor-faktor penyebab anak tidak dan atau putus sekolah, kiranya faktor ekonomi yang paling mendominasi. Permasalahan kemiskinan sebagai faktor utama penyebab anak tidak dan atau putus sekolah, maka optimalisasi pemberian beasiswa menjadi alternatif kebijakannya. Dikatakan optimalisasi, karena secara faktual pemerintah sudah menggelontorkan kebijakan pemberian beasiswa. Permasalahannya adalah belum tepatnya sasaran, mekanisme, dan sistem pemberian dana. Oleh karenanya, perlu ada upaya pembenahan sistem pemberian beasiswa. Siapa, bagaimana caranya, dan untuk apa pemanfaatannya adalah beberapa hal yang mesti direvitalisasi.

e. **Program Bantuan Paket Pendidikan**

Teridentifikasinya anak yang tidak dan atau putus sekolah baik karena faktor ekonomi dan jarak maka Program Bantuan Paket Pendidikan menjadi alternatif lain selain optimalisasi beasiswa. Program Bantuan Paket Pendidikan yang dimaksudkan adalah pemberian bantuan berupa kebutuhan sekolah dapat mencakup pakaian sekolah, tas sekolah, buku tulis, buku paket, fasilitas dasar belajar lainnya, ataupun biaya pengganti transportasi ke sekolah.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan di lapangan, penulis menyimpulkan bahwa dalam proses pemberdayaan masyarakat tentunya dibutuhkan tingkat partisipasi masyarakat dalam hal memahami manfaat dan pentingnya proses pendidikan yakni bersekolah melalui program-program yang ada. Dengan adanya sosialisasi tentang manfaat dan fungsi sekolah diharapkan mampu mengubah pola pikir masyarakat mengenai pendidikan yang selama ini masyarakat menganggap bahwa orang yang sekolah akan menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) akan dianggap menjadi orang yang sukses jika tidak menjadi PNS, maka anak yang sekolah hanya membuang tenaga, biaya dan waktu saja. Selain itu pemerintah juga berkewajiban memberikan bantuan berupa dana bagi masyarakat miskin dalam hal mengatasi beban masyarakat terhadap biaya pendidikan.

Beberapa kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Pinrang diatas, dalam mengentaskan anak putus sekolah yang terjadi di Kecamatan Lembang, menurut penulis program optimalisasi beasiswa pendidikan pendidikan bagi masyarakat miskin serta program bantuan paket pendidikan yang belum terealisasi secara optimal. Hal ini terjadi karena tidak terjalin koordinasi dan kerjasama yang baik antara pihak pemerintah daerah yang terkait dalam hal ini Kepala Desa/Lurah dengan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga mengenai data masyarakat miskin. Sehingga dalam penyaluran bantuan ini dianggap Puang Alling dan Puang Bojo tidak merata dan tidak adil. Karena ada yang seharusnya mendapatkan bantuan tersebut tapi buktinya mereka tidak mendapatkan, dan ada yang tidak pantas mendapatkan bantuan tersebut justru mendapatkan bantuan tersebut. Jadi, menurut penulis pemerintah daerah yang terkait yakni Kepala Desa/Lurah bekerjasama dengan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga untuk mendata masyarakat miskin yang memang pantas untuk menerima bantuan tersebut.

Selain dari permasalahan bantuan beasiswa bagi masyarakat miskin dan bantuan paket pendidikan, masalah sosialisasi mengenai pendidikan dan bantuan paket pendidikan, masalah sosialisasi mengenai pendidikan juga tidak berjalan secara optimal. Hal ini dipaparkan oleh Puang Alling yang merasa tidak pernah mendapatkan informasi dari pemerintah daerah atau Dinas terkait mengenai sosialisasi tersebut, sehingga dia tidak pernah hadir dalam sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada Bab IV yang menyajikan hasil penulisan dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kondisi obyektif (gambaran umum) mengenai studi anak putus sekolah yang terjadi di Kecamatan Lembang di tahun 2010 mencapai angka anak putus sekolah yang terjadi di Kecamatan Lembang mencapai angka 979 anak. Yang terbagi di beberapa tingkatan sekolah, di tingkat SD jumlah anak putus dan atau tidak sekolah adalah 166 anak, di tingkat SMP berjumlah 372 anak, dan di tingkat SMA berjumlah 441 anak.
2. Berdasarkan 5 kasus yang menjadi representative di Kecamatan Lembang, maka dapat disimpulkan bahwa: faktor-faktor yang menjadi penyebab anak putus sekolah antara lain:
  - a. Lemahnya Ekonomi Keluarga
  - b. Latar Belakang Pendidikan Orang Tua
  - c. Kurangnya Minat Anak Untuk Bersekolah
  - d. Kondisi Lingkungan Tempat Tinggal Anak
  - e. Teman Sepergaulan

- f. Pandangan Masyarakat Terhadap Pendidikan
3. Peranan pemerintah daerah dalam mengentaskan anak putus sekolah adalah sebagai berikut:
- a. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengentasan Anak Putus Sekolah yakni berupa gerakan penuntasan wajib belajar berbasis desa termasuk pemutakhiran data anak putus dan atau tidak sekolah.
  - b. Sosialisasi Kepada Masyarakat
  - c. Pemberian Bantuan Dana
  - d. Optimalisasi Pemberian Beasiswa Pendidikan Bagi Masyarakat Miskin
  - e. Program Bantuan Paket Pendidikan

## 5.2. Saran

1. Pemerintah diharapkan dapat mengeluarkan kebijakan tegas yang bersifat pemberian sanksi terhadap anak yang putus dan atau tidak sekolah sebagai upaya pengentasan anak putus sekolah, sehingga kedepannya para masyarakat menjadi jera karena tidak mengikuti proses pendidikan formal.
2. Pemerintah daerah diharapkan terus melakukan pendataan mengenai anak putus sekolah di setiap daerah secara merata. Data ini, kemudian

dijadikan landasan dalam merumuskan suatu kebijakan yang menjadi pegangan dalam pengentasan anak putus sekolah.

3. Pemerintah daerah perlu terus mengadakan sosialisasi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya bersekolah hingga ke pelosok pegunungan serta daerah yang terpencil secara berkelanjutan.
4. Pemerintah daerah perlu membangun sistem kerjasama yang terpadu antara pihak-pihak yang terkait dalam penyelenggaraan pengentasan anak putus sekolah secara terprogram dan berkelanjutan seperti pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan orang tua siswa. Dengan adanya kerjasama ini diharapkan semua pihak yang terkait mulai dari pemerintah desa hingga masyarakat mempunyai tanggung jawab dalam mengentaskan anak putus sekolah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Isbandi Rukmianto. 2008. *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. PT RajaGrafindo Persada: Jakarta.
- Arifin, Indar. 2010. *Birokrasi Pemerintahan dan Perubahan Sosial Politik di Kabupaten Wajo*. Pustaka Refleksi: Makassar.
- Damayanti, Whanty. 2006. *Peranan Pemerintah Dalam Meningkatkan Kecerdasan Anak Didik Pada Lembaga Pendidikan Swasta Di Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara*. Program Studi Ilmu Pemerintahan: Universitas Hasanuddin.
- Fahrudin, Adi. *Pemberdayaan, Partisipasi, Dan Penguatan Kapasitas Masyarakat*. Humaniora: Bandung.
- Gadjong, Agussalim Andi. 2007. *Pemerintahan Daerah*. Ghalia Indonesia: Bogor.
- Hasbullah. 2010. *Otonomi Pendidikan: Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan*. Rajawali Pers: Jakarta.
- Idrus, Muhammad. 2007. *Metode Penulisan Ilmu-ilmu Sosial (Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif)*. Ull Press: Yogyakarta.
- Imron, Ali. 2002. *Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia: Proses, Produk dan Masa depannya*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Nasution, S. 2010. *Sosiologi Pendidikan*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid 1*. PT Rineka Cipta: Jakarta.

- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid 2*. PT Rineka Cipta: Jakarta.
- Ndraha, Taliziduhu. 2002. *Pengantar Teori Pengembangan Sumber Daya Manusia*. PT Rineka Cipta: Jakarta.
- Ndraha, Taliziduhu. 1997. *Metodologi Ilmu Pemerintahan*. PT Rineka Cipta: Jakarta.
- Rochaety Ety,dkk. 2005. *Sistem Informasi Manajemen Pendidikan*. Cetakan Pertama. PT Bumi Aksara: Jakarta.
- Sedarmayanti, 2004, *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Bagian Kedua Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik)*, Mandar Maju: Bandung.
- Sindhunata. 2000. *Menggagas Paradigama Baru Pendidikan "demokratisasi, Otonomi, Civil Society, Globalisasi*. Kansius: Yogyakarta.
- Soetriono dan SRDM Rita Hanafie. 2007. *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penulisan*. C.V Andi Offset: Yogyakarta.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penulisan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*. Alfabeta: Bandung.
- Suharto,Edi. 2006. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat "Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial"*. Refika Aditama: Bandung.
- Suhendra K. 2006. *Peranan Birokrasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Alfabeta: Bandung.
- Sumaryadi, I Nyoman. 2010. *Sosiologi Pemerintahan Dari Perspektif Pelayanan, pemberdayaan, Interaksi, dan Sistem Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*. Ghalia Indonesia: Bogor.

Sumarjono, Selo. 1974. *Sistem Sosial Indonesia*. Rineka Cipta: Yogyakarta,

Syafiie, Inu Kencana. 2003. *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*. PT Refika Aditama: Bandung.

Tilaar, A, R. 2000. *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*. Cetakan Pertama. PT Rineka Cipta: Jakarta

Tim Prima Pena. 2006. *Kamus Ilmiah Populer*. Gitamedia Pres: Jakarta.

Tim Lemhanmas. 1995. *Pembangunan Nasional*. Balai Pustaka: Jakarta.

Oktaviana, Nani. 2008. *Tesis Analisis Pendidikan dan Pelatihan Dalam Pengembangan Karir Pegawai Pada Badan Kepegawaian (BKD) Provinsi Sulawesi Tengah*. Program Pascasarjana. Universitas Hasanuddin, Makassar.

Walgito, Bimo. 1999. *Psikologi Sosial (Suatu Pengantar)*. C.V Andi Offset: Yogyakarta.

### MEDIA INTERNET

Pembangunan pemberdayaan: enabling, empowering and protecting, 28 September 2011. (<http://www.pemberdayaan.com>).

Pengertian dan definisi Pembangunan Menurut Para Ahli, 30 September 2011. (<http://sirajuddinputra-welcomeinmyparadise.blogspot.com>).

Perencanaan dan Manajemen Pembangunan Pendidikan. 13 Oktober 2011. (<http://indrajayaadriand.wordpress.com>).

Dana untuk pendidikan di Kabupaten Pinrang. 14 Januari 2012. (<http://regional.kompasiana.com>).

## UNDANG-UNDANG

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang  
Pemerintah Daerah.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang  
Pemerintah Daerah.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem  
Pendidikan Nasional.

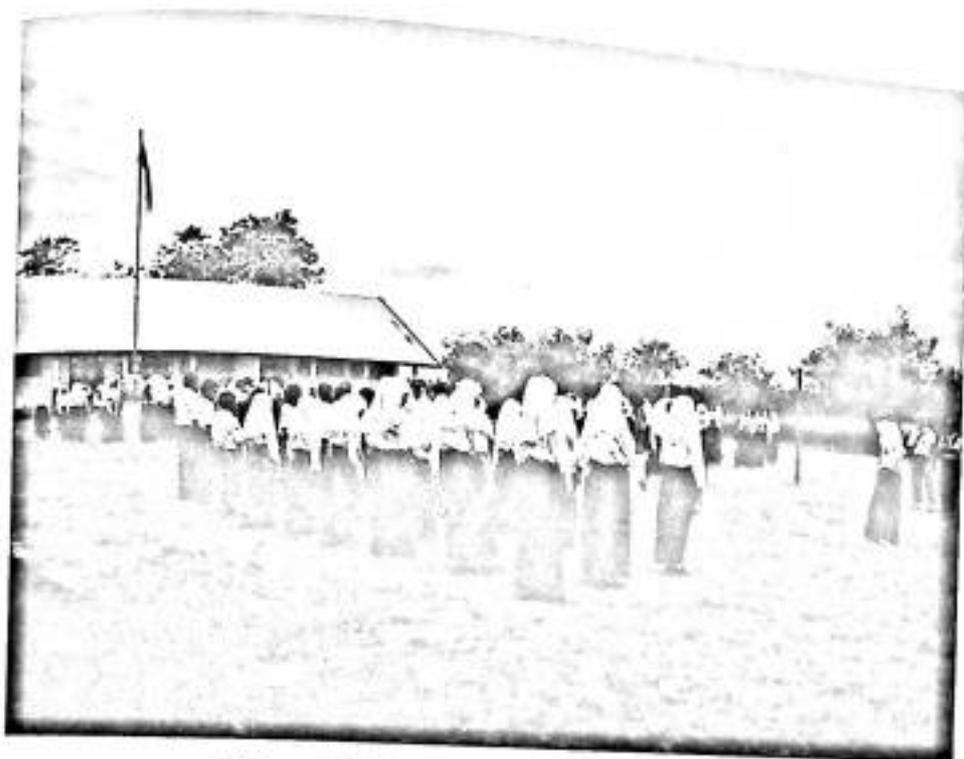
Peraturan Bupati Pinrang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Pelaksanaan  
Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 19 Tahun 2008  
Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah  
Kabupaten Pinrang.

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2009 Tentang  
Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Di Provinsi Sulawesi Selatan.

# Lampiran-Lampiran

**Dinas Sosial, Kebudayaan dan Pariwisata Sedang Melakukan Sosialisasi  
Kepada Masyarakat Kecamatan Lembang di Kantor Camat Kecamatan  
Lembang**

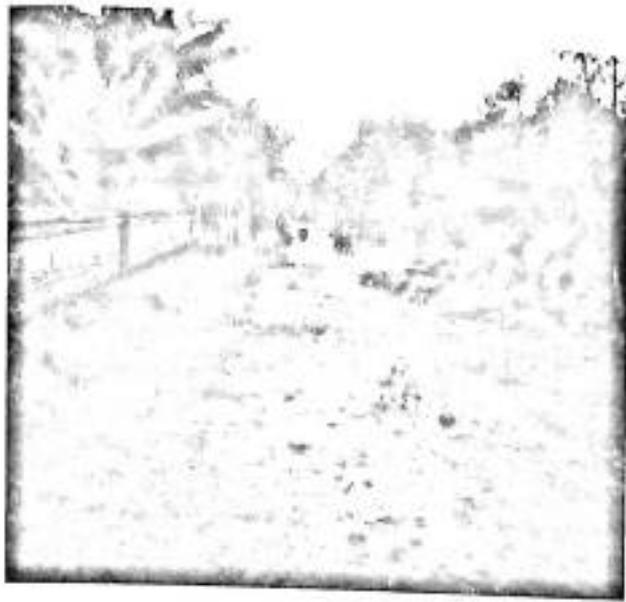




(Siswa SMP N 3 Rajang Kecamatan Lembang)



(Proses Belajar Mengajar di SDN 145 Pajalele, Desa Binanga Karaeng Kecamatan Lembang)



(Kondisi Jalanan Menuju SDN 155 Bakaru Kecamatan Lembang)



(Kondisi Bangunan SDN 155 Bakaru Kecamatan Lembang)



Aktivitas anak-anak di Bakaru, Desa Uluasaddang)

UNDANG-UNDANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 20 TAHUN 2003

TENTANG

SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menyebut :

- a. Bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;
- b. Bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah dan ketakwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang;
- c. Bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan;
- d. Bahwa Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak memadai lagi dan perlu diganti serta perlu disempurnakan agar sesuai dengan amanat perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d perlu membentuk Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Menyebut :

Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 C ayat (1), Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan persetujuan bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
DAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:  
Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
2. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.
3. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.
4. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
5. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

## UNDANG-UNDANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

6. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
7. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
8. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
9. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
10. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
11. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
12. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
13. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
14. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
15. Pendidikan jarak jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi, dan media lain.
16. Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
17. Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
18. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah.
19. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
20. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
21. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
22. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
23. Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana, dan prasarana.
24. Dewan pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
25. Komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
26. Warga negara adalah warga negara Indonesia baik yang tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
27. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
28. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
29. Pemerintah daerah adalah pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, atau pemerintah kota.
30. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pendidikan nasional.

**BAB II**  
**DASAR, FUNGSI DAN TUJUAN**  
**Pasal 2**

Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

**Pasal 3**

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

**BAB III**  
**PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**  
**Pasal 4**

- (1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
- (2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.
- (3) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
- (4) Pendidikan diselenggarakan dengan member keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
- (5) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.
- (6) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

**BAB IV**  
**HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA**  
**ORANG TUA MASYARAKAT DAN PEMERINTAH**  
**Bagian Kesatu**  
**Hak dan Kewajiban Warga Negara**  
**Pasal 5**

- (1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
- (2) Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.
- (3) Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.
- (4) Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.
- (5) Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.

**Pasal 6**

- (1) Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.
- (2) Setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan.

**Bagian Kedua**  
**Hak dan Kewajiban Orang Tua**  
**Pasal 7**

- (1) Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya.
- (2) Orang tua dan anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya.

**Bagian Ketiga  
Hak dan Kewajiban Masyarakat**

**Pasal 8**

Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.

**Pasal 9**

Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.

**Bagian Keempat  
Hak dan Kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah.**

**Pasal 10**

Pemerintah dan pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 11**

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.
- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.

**BAB V  
PESERTA DIDIK**

**Pasal 12**

- (1) Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak:
  - a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
  - b. mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;
  - c. mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
  - d. mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
  - e. pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara;
  - f. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.
- (2) Setiap peserta didik berkewajiban:
  - a. menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan;
  - b. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Warga negara asing dapat menjadi peserta didik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (4) Ketentuan mengenai hak dan kewajiban peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

**BAB VI  
JALUR, JENJANG, DAN JENIS PENDIDIKAN**

**Bagian Kesatu**

**Umum**

**Pasal 13**

- (1) Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya.
- (2) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan system terbuka melalui tatap muka dan/atau melalui jarak jauh.

**Pasal 14**

Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

**Pasal 15**  
Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus.

**Pasal 16**  
Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan dapat diwujudkan dalam bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

**Bagian Kedua  
Pendidikan Dasar**

**Pasal 17**

- Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah.
- (1) Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.
  - (2) Ketentuan mengenai pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

**Bagian Ketiga  
Pendidikan Menengah**

**Pasal 18**

- Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar.
- (1) Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan.
  - (2) Pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atas (SMA), madrasah aliyah (MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), dan madrasah aliyah kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.
  - (3) Ketentuan mengenai pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

**Bagian Keempat  
Pendidikan Tinggi**

**Pasal 19**

- (1) Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh pendidikan tinggi.
- (2) Pendidikan tinggi diselenggarakan dengan sistem terbuka.

**Pasal 20**

- (1) Perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas.
- (2) Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Perguruan tinggi dapat menyelenggarakan program akademik, profesi, dan/atau vokasi.
- (4) Ketentuan mengenai perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

**Pasal 21**

- (1) Perguruan tinggi yang memenuhi persyaratan pendirian dan dinyatakan berhak menyelenggarakan program pendidikan tertentu dapat memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi sesuai dengan program pendidikan yang diselenggarakannya.
- (2) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan yang bukan perguruan tinggi dilarang memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi.
- (3) Gelar akademik, profesi, atau vokasi hanya digunakan oleh lulusan dari perguruan tinggi yang dinyatakan berhak memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi.
- (4) Penggunaan gelar akademik, profesi, atau vokasi lulusan perguruan tinggi hanya dibenarkan dalam bentuk dan singkatan yang diterima dari perguruan tinggi yang bersangkutan.
- (5) Penyelenggara pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau penyelenggara pendidikan bukan perguruan tinggi yang melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa penutupan penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai.
- (6) Gelar akademik, profesi, atau vokasi yang dikeluarkan oleh penyelenggara pendidikan yang tidak sesuai dengan ketentuan ayat (1) atau penyelenggara pendidikan yang bukan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak sah.